

**Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks
Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2023**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Putri Salsabila
Nomor Mahasiswa : 20313320
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2025

**Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks
Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2023**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana Jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Putri Salsabila

Nomor Mahasiswa : 20313320

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025

Penulis,



Putri Salsabila

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks
Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023

Nama : Putri Salsabila
Nomor Mahasiswa : 20313320
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 5 Agustus 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nur Feriyanto', with a horizontal line drawn underneath it.

Prof., Dr., Drs. Nur Feriyanto M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah

Disusun oleh : PUTRI SALSABILA

Nomor Mahasiswa : 20313320

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 02 September 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Penguji : Jannahar Saddam Ash Shidiqie, SEI.,MEK.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku”

(QS. As-Syu'ara : 62)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil rabbil 'alamin, beribu kata syukur terucap atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, atas segala berkah dan kemudahan yang mengiringi perjalanan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya serta sebagai tanda perjuangan saya dalam menggapai cita-cita yang mulia. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga semua kemudahan dan kelancaran terus menyertai perjalanan kuliah saya sampai saat ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya dan teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya baik dalam keadaan suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, tiada kata terindah yang bisa penulis sampaikan kecuali ucapan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayahNya. Shalawat teriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia dari jaman jahiliyah menuju ke jalan yang penuh peradaban seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023**”.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang memberikan doa dari awal hingga terselesainya tugas skripsi ini. Dalam hal ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Khamim Ru'yat dan Ibu Siti Masruroh, serta adik-adik saya yang tak henti-hentinya selalu mendukung dan mendoakan atas kemudahan dan kelancaran semua proses penyusunan skripsi ini, serta dengan setia selalu mendengar keluh kesah penulis dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan.
2. Bapak Prof., Dr., Drs. Nur Feriyanto M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selama masa bimbingan sudah meluangkan baik waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Bapak Abdul Hakim., S.E.,

M.Ec., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang dengan sabar telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Keluarga kedua saya di Yogyakarta, teman-teman seperjuangan saya, teman-teman KKN Unit 51, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga selalu penulis harapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk perbaikan karya penulis selanjutnya dari semua pihak. Atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 1 Agustus 2025

Penulis,

Putri Salsabila

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.2 Landasan Teori	13

2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	13
2.2.2	Kemiskinan.....	15
2.2.3	Pengangguran.....	16
2.3	Kerangka Penelitian.....	18
2.4	Hubungan Antar Variabel	18
2.4.1	Hubungan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 18	
2.4.2	Hubungan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia 19	
2.4.3	Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia 19	
2.5	Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III.....		21
METODE PENELITIAN.....		21
3.1	Jenis dan Sumber Data	21
3.2	Definisi Variabel Operasional.....	22
3.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y)	22
3.2.2	Tingkat Kemiskinan (X1).....	22
3.2.3	Tingkat Pengangguran (X2).....	23
3.3	Metode Analisis.....	23
3.3.1	Analisis Regresi Data Panel	23
3.4	Pemilihan Model dalam Pengolahan Data	24
3.5	Pengujian Statistik.....	26
3.5.1	Uji F.....	26
3.5.2	Uji t.....	26
3.5.3	Koefisien Determinasi (<i>R-Squared</i>).....	27

BAB IV	28
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Deskripsi Data Penelitian	28
4.2 Analisis Data.....	28
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	28
4.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	29
4.3.1 Pengujian Menggunakan <i>Common Effects Model</i> , <i>Fixed Effects Model</i> , dan <i>Random Effects Model</i>	29
4.3.2 Uji <i>Chow</i>	31
4.3.3 Uji <i>Hausman</i>	32
4.3.4 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	33
4.4 Model Terbaik.....	33
4.5 Uji Hipotesis.....	34
4.5.1 Uji Simultan (Uji F).....	34
4.5.2 Uji Parsial (Uji t)	35
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	36
4.6 Pembahasan.....	37
4.6.1 Pengaruh Variabel Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 37	
4.6.2 Pengaruh Variabel Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 38	
4.6.3 Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	39
BAB V.....	41
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41

5.2	Implikasi.....	42
DAFTAR PUSTAKA		44
LAMPIRAN.....		48

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif.....	28
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel menggunakan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).....	30
Tabel 4. 3 Uji Chow	32
Tabel 4. 4 Uji Hausman.....	32
Tabel 4. 5 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	33
Tabel 4. 6 Hasil Uji F.....	34
Tabel 4. 7 Hasil Uji t.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2023 .	2
Gambar 1. 2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2010-2023.....	3
Gambar 1. 3 Data Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023	4
Gambar 1. 4 Data Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023.....	6
 Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Common Effect Model (CEM)	48
Lampiran 2 Fixed Effect Model (FEM)	49
Lampiran 3 Random Effect Model (REM)	50
Lampiran 4 Uji Chow	51
Lampiran 5. Uji Hausman	51
Lampiran 6. Model Terbaik Fixed Effect Model (FEM)	52
Lampiran 7. Data Yang Diolah	53

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, yang mencakup tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008–2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang diterapkan adalah metode data panel, yang menggabungkan data *time series* selama 16 tahun (2008–2023) dan *cross-section* meliputi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, variabel tingkat kemiskinan dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pengangguran.

BAB I

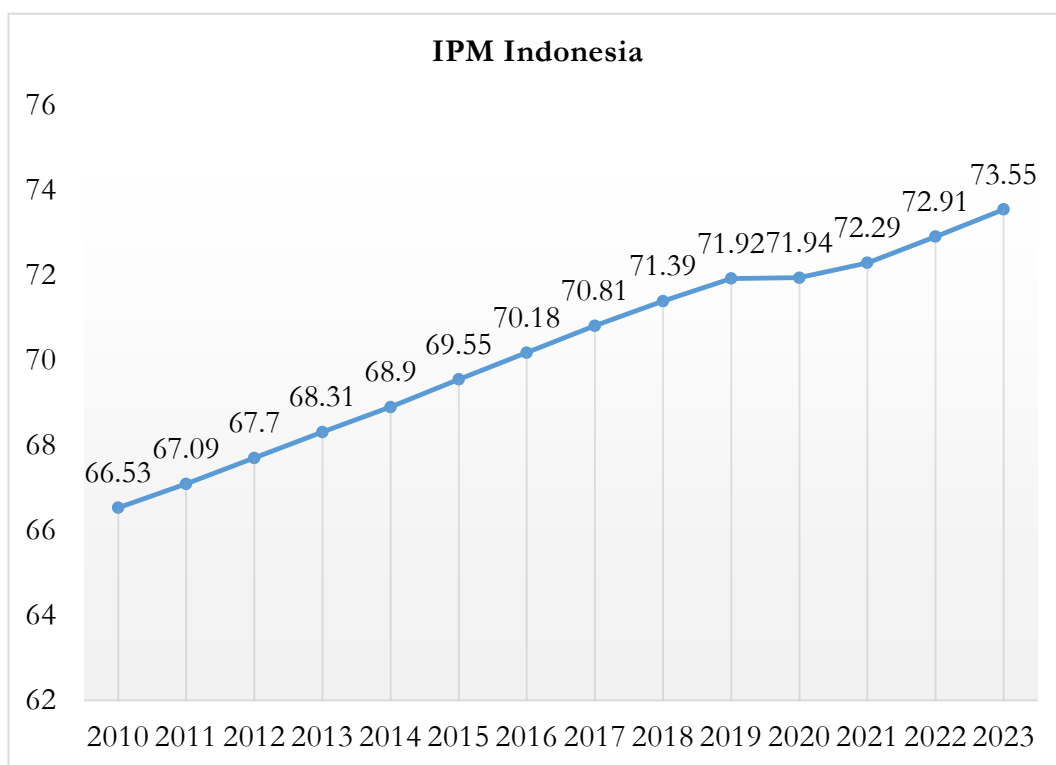
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Proses ini mencakup kajian terhadap berbagai aspek, seperti perubahan status sosial, dinamika masyarakat, serta aspek nasional, termasuk laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan program pengentasan kemiskinan. Secara fundamental, pembangunan harus mempertimbangkan transformasi masyarakat secara menyeluruh, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dasar individu serta kelompok sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Kiha *et al.*, 2021). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pembangunan ekonomi menjadi faktor kunci bagi negara berkembang, termasuk Indonesia (Putri, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas hidup manusia (BPS, 2021). IPM, yang juga dikenal sebagai *Human Development Index (HDI)*, diperkenalkan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* pada tahun 1990. Indeks ini terdiri dari tiga komponen utama: tingkat standar hidup, tingkat pendidikan (yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf pada individu berusia di atas lima belas tahun), dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dianalisis melalui kombinasi kemampuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan papan, sebagai bagian dari upaya peningkatan taraf hidup (Kiha *et al.*, 2021). Pembangunan manusia adalah komponen penting dalam pembangunan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh, semakin besar kemungkinan tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai (Fajri, 2021).

Keberhasilan pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh peran serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung. Tujuan pembangunan manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting melalui pengalokasian anggaran sektor publik, terutama dalam bidang kesehatan, untuk meningkatkan harapan hidup dan menurunkan angka kematian. Di bidang pendidikan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan angka melek huruf. Selain itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan infrastruktur juga berperan dalam meningkatkan pendapatan riil per kapita (Zakaria, R. 2018).

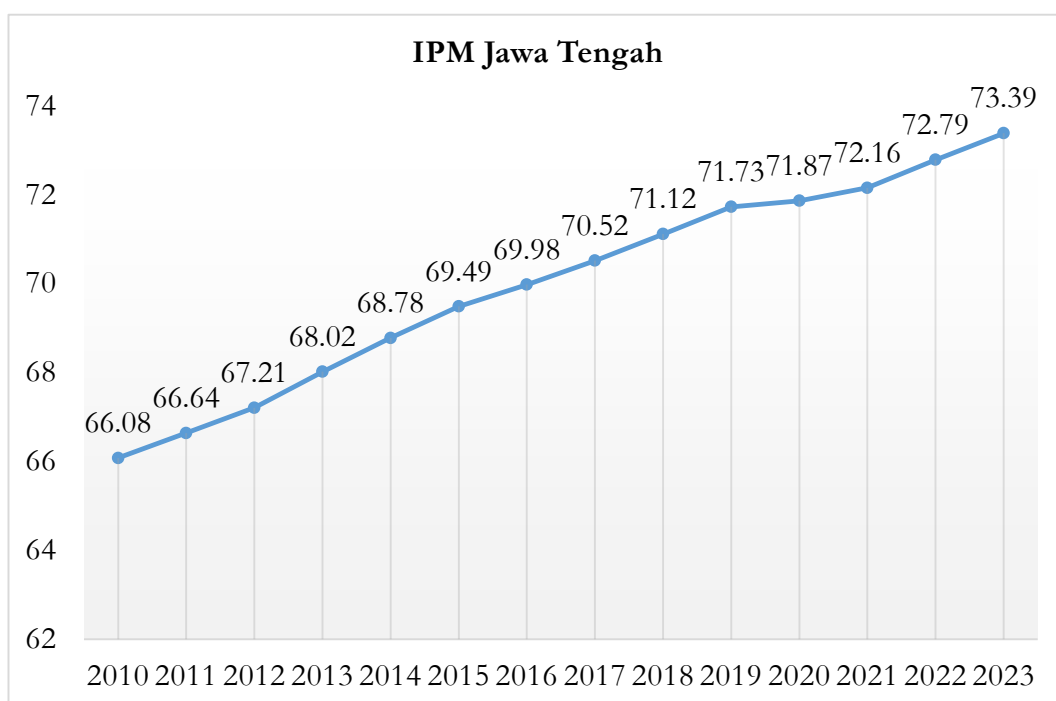


Gambar 1. 1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2023

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023. Pada

tahun 2010, IPM Indonesia tercatat sebesar 66,53, dan mengalami kenaikan yang konsisten hingga mencapai 73,55 pada tahun 2023 (BPS, 2023). Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara maju, berkembang ataupun dianggap negara yang tertinggal adalah dengan melihat seberapa tinggi nilai IPM di negara tersebut (Faizin, M. 2021). Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP mengelompokkan tingkat pembangunan suatu wilayah ke dalam empat kategori, yaitu rendah (nilai IPM kurang dari 60), sedang (nilai IPM antara 60 hingga 70), tinggi (nilai IPM antara 70 hingga 80), dan sangat tinggi (nilai IPM 80 atau lebih) (BPS, 2024).

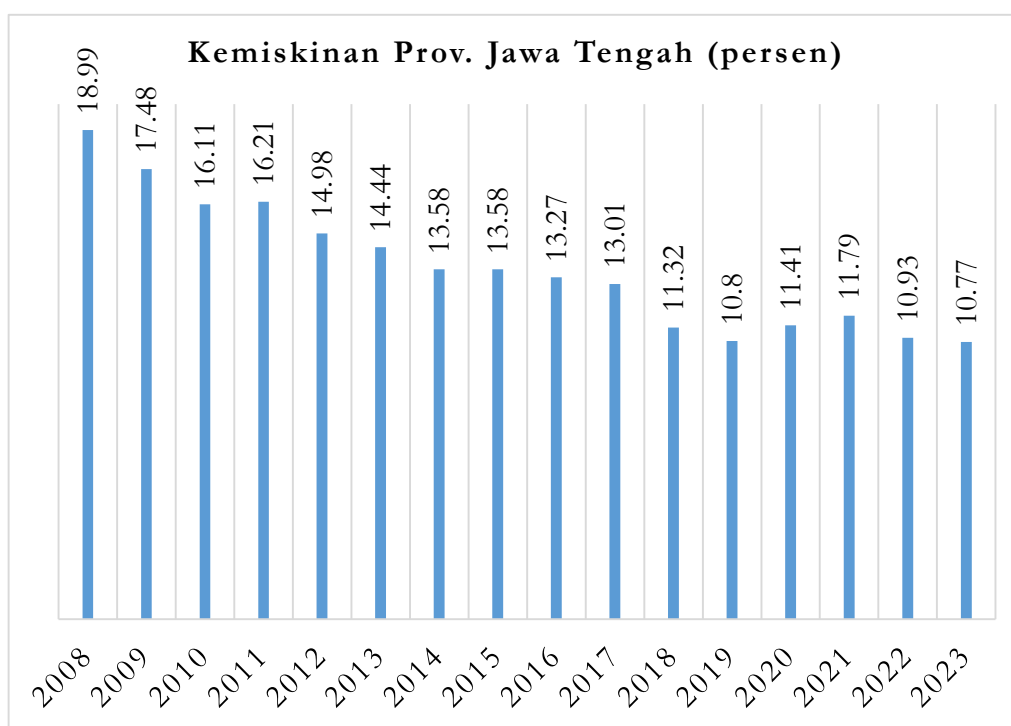


Gambar 1. 2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2010-2023

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2023

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 1.2, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,39, mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 (BPS, 2023). Peningkatan IPM ini sejalan dengan arah pembangunan

nasional yang bertujuan meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau setidaknya diminimalkan. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Handayani, 2024).



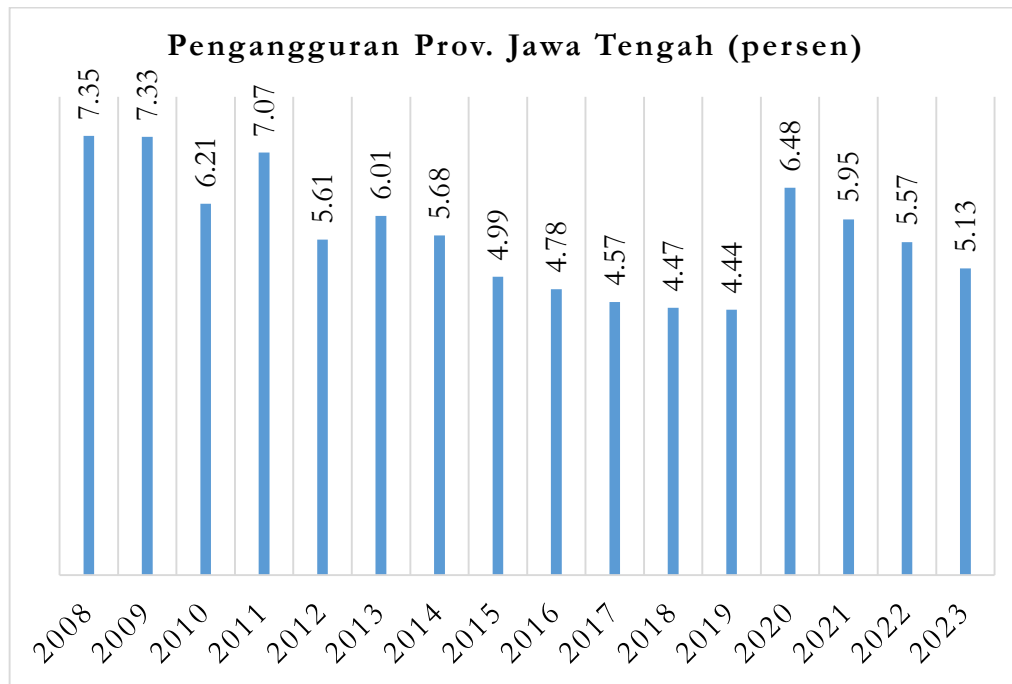
Gambar 1. 3 Data Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2023

Pada Gambar 1.3, data menunjukkan adanya fluktuasi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah antara tahun 2008 hingga 2023. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin mencapai 10,77 persen, mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, tingkat kemiskinan yang mencapai lebih dari 10 persen termasuk dalam kategori yang

cukup tinggi. Kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan sumber daya manusia, di mana salah satunya tercermin pada harapan hidup yang lebih pendek. Selain itu, masalah kemiskinan juga mempengaruhi daya beli masyarakat, yang berakibat pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan seringkali terabaikan (BPS, 2023).

Sadono Sukirno (1994) menyatakan bahwa individu yang berada dalam kelompok usia kerja namun belum memiliki pekerjaan disebut sebagai pengangguran. Secara statistik, pengangguran merujuk pada penduduk yang belum bekerja, baik yang aktif mencari pekerjaan maupun yang tidak mencarinya, karena dianggap telah memiliki pekerjaan meskipun belum mulai bekerja (Kasnelly, S., & Wardiah, J. 2021). Sebagai contoh, di Jawa Tengah, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah angkatan kerja di provinsi tersebut meningkat dari 19.474.934 jiwa pada tahun 2022 menjadi 21.069.135 jiwa pada tahun 2023, atau mengalami kenaikan sebesar 1.594.201 jiwa. Hal ini menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai agar tingkat pengangguran dapat ditekan (BPS, 2023). Kenaikan ini mencerminkan tekanan yang signifikan terhadap pasar kerja di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat memerlukan keseimbangan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Apabila kesempatan kerja tidak cukup untuk menampung angkatan kerja yang ada, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Sebaliknya, jika lapangan pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja, maka tingkat pengangguran akan berkurang (Kiha, *et al.*, 2021).



Gambar 1. 4 Data Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2023

Pada Gambar 1.4, data menunjukkan adanya fluktuasi tingkat pengangguran di Jawa Tengah selama periode 2008 hingga 2023. Pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,48 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 4,44 persen. Sedangkan pada tahun 2023, TPT tercatat sebesar 5,13 persen, mengalami penurunan sebesar 0,44 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022 (BPS, 2023).

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang memiliki dampak signifikan dan langsung karena mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Secara umum, kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan serta tekanan psikologis. Dampak negatif dari pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, yang berdampak pada penurunan kemakmuran dan kesejahteraan. Penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pengangguran dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, karena tanpa pendapatan, individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli. Dalam aspek politik,

pengangguran dapat menimbulkan efek buruk, berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Primandari, 2019).

Tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja ekonomi di wilayah tersebut. Ekonomi dapat berkembang apabila ada peningkatan dalam produksi barang dan jasa. Indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah terus menunjukkan kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian sedang berada dalam kondisi yang baik dan berkembang (Putri, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang analisis tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah dengan judul "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. IPM sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

3. Apakah Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui bahwa tingkat Kemiskinan dan Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama menjalani perkuliahan di fakultas tersebut.
2. Menjadi referensi tambahan, bahan acuan, dan pedoman, serta sebagai penyempurnaan untuk penelitian ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang ingin diteliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, termasuk sistematika penelitian secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat dijadikan rujukan untuk membandingkan dengan penelitian ini. Di samping itu, bab ini juga menguraikan teori-teori yang mendukung topic penelitian, guna mengevaluasi kesesuaian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan jenis data yang akan dikumpulkan, sumber pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk mengolah data dari variable-variabel yang telah disebutkan.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data dari variabel-variabel yang telah dikumpulkan, termasuk uji metode yang telah ditentukan. Data akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk dicocokkan dengan hipotesis yang diajukan di awal penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini membahas hasil yang telah diolah pada dua sub bab sebelumnya, mencakup kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian dari bab IV, yang memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan. Implikasi dijelaskan berdasarkan dari hasil penelitian dan menjelaskan bagaimana peran yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai hubungan antara Kemiskinan, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian sebelumnya berperan penting dalam memperkuat argumen dan memperluas pemahaman tentang topik yang diteliti. Oleh karena itu, kajian ini memberikan acuan yang tepat dan membantu dalam pemilihan variabel yang relevan, serta memahami pengaruh masing-masing variabel. Selain itu, penelitian terdahulu juga mempengaruhi pemilihan metode analisis data. Berikut adalah daftar penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Penelitian Abie Rachman Muhamad dan Dewi Rahmi (2023) mengenai pengaruh teknologi, kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat, menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini dikarenakan sektor ekonomi yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat belum memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian Novegya Ratih Primandari (2019) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan periode 2004–2018 menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan IPM. Selain itu, variabel pengangguran juga berpengaruh positif terhadap IPM, hal ini disebabkan oleh adanya

pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat ketidaksesuaian sementara antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia. Pengangguran friksional terjadi pada individu dengan tingkat pendidikan tinggi yang cenderung lebih selektif dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasinya. Meskipun tingkat pengangguran meningkat, proses pencocokan kerja yang lebih selektif ini dapat meningkatkan kualitas hidup, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap IPM.

Penelitian Siti Nur Fatimah (2018) mengenai Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, menggunakan metode analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tidak secara signifikan memengaruhi pencapaian IPM yang rendah. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, karena tingginya jumlah pengangguran akan mengurangi kemakmuran kehidupan masyarakat dan pendapatan mereka, sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, menggunakan metode analisis yang melibatkan telaah pustaka yang diperkuat dengan analisis deskriptif kuantitatif terhadap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif kemiskinan dan pengangguran terhadap kualitas hidup masyarakat, yang terlihat dari rendahnya angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan daya beli. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah, semakin rendah pencapaian IPM nya, akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang memadai. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan

Manusia. Variabel yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, dan Hendriana Trifonia Lau (2021) mengenai pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu, dengan menggunakan metode analisis *time series*. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk, pengangguran dan kemiskinan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya, peningkatan atau penurunan masing-masing faktor ini tidak secara langsung serta merta meningkatkan atau menurunkan IPM. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Misalnya, pertumbuhan jumlah penduduk tanpa peningkatan kualitas SDM (melalui pendidikan dan kesehatan) dan tanpa lapangan kerja yang memadai justru dapat menjadi beban. Selain itu, program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (seperti bantuan sosial atau subsidi) dapat membantu menjaga tingkat IPM, meskipun angka kemiskinan secara keseluruhan masih tinggi.

Penelitian oleh Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda (2020) mengenai Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan metode analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen seperti kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Tingginya jumlah pengangguran akan mengurangi kemakmuran hidup masyarakat, karena berkurangnya pendapatan masyarakat yang kemudian meningkatkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan, pada gilirannya, dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena masyarakat yang miskin cenderung tidak memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, melainkan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ketika pendidikan tidak menjadi prioritas, maka pada masa depan taraf hidup masyarakat akan tetap rendah, yang pada akhirnya akan menyebabkan pengangguran meningkat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator penting yang menunjukkan daya saing suatu negara adalah kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan efektivitas pemerintahan. Apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan yang memadai, mereka akan mampu berkontribusi secara lebih optimal terhadap pembangunan nasional (Susilo *et al.*, 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam aspek kualitas hidup manusia. Diciptakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990, IPM menekankan pentingnya peran manusia serta sumber daya yang dimilikinya dalam proses pembangunan. IPM dihitung berdasarkan rata-rata pencapaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu (BPS, 2021):

1. Umur panjang dan kesehatan, yang diukur melalui indikator angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan, yang dinilai berdasarkan dua komponen, yaitu rata-rata lama sekolah untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah untuk anak-anak berusia 7 tahun.
3. Standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP telah menetapkan suatu standar pengukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM tidak hanya berfokus pendapatan per kapita sebagai ukuran pembangunan ekonomi, tetapi juga menyoroti beberapa aspek yang lebih sensitif dan menyeluruh terkait kualitas hidup manusia. IPM dianggap mampu menilai pembangunan di suatu daerah karena beberapa alasan (Izzah, 2015):

1. Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas manusia.
2. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses hasil pembangunan, seperti pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, sebagai bagian dari hak hak dasar mereka.
3. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai salah satu alat ukur kinerja suatu daerah, khususnya dalam mengevaluasi pembangunan kualitas hidup masyarakat.
4. Indeks Pembangunan Manusia belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini satu satunya indikator paling penting yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dapat dibedakan menjadi dua metode perhitungan, yaitu metode lama dan metode baru. Metode lama dan baru dalam perhitungan IPM menggunakan variabel yang berbeda, sehingga menghasilkan angka IPM yang berbeda pula. Metode lama digunakan pada periode 1993 hingga 2013, sedangkan metode baru mulai diterapkan sejak 2010 hingga sekarang. Pada metode lama, variabel yang digunakan meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan, dan Rata-Rata Lama Sekolah. Sementara itu, metode baru menggunakan variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan angka kemampuan daya beli masyarakat (Arofah, I., & Rohimah, S., 2019).

Tingginya pendapatan, minimnya kesenjangan dalam pendidikan, sistem pendidikan yang bermutu, serta kondisi kesehatan dan gizi yang baik mencerminkan standar hidup yang tinggi, begitupun sebaliknya. Tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah pada periode tertentu dapat dikategorikan menjadi empat kelompok. Kategorisasi ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan kesamaan tingkat pencapaian pembangunan manusia (BPS,2024).

1. Kelompok sangat tinggi: $IPM \geq 80$.
2. Kelompok tinggi: $70 \leq IPM < 80$.

3. Kelompok sedang: $60 \leq \text{IPM} < 70$.
4. Kelompok rendah: $\text{IPM} < 60$.

2.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu mengalami kekurangan uang dan barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan merupakan konsep yang kompleks dengan lima dimensi utama (Ningrum *et al.*, 2020): 1. kemiskinan itu sendiri, 2. ketidakberdayaan, 3. kerentanan dalam menghadapi situasi darurat, 4. ketergantungan, dan 5. keterasingan, baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan tidak hanya sekadar hidup dengan kekurangan uang atau memiliki tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti tingkat kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan serta ketidak mampuan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Kemiskinan dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yaitu (Suryawati, 2005):

1. Kemiskinan Absolut: Kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan Relatif: Kondisi kemiskinan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan di masyarakat.
3. Kemiskinan Kultural: Kemiskinan yang disebabkan oleh sikap atau pola pikir individu atau masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Misalnya, sikap malas, tidak mau berusaha memperbaiki taraf hidup, boros, atau kurang kreatif meskipun telah ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan Struktural: Situasi kemiskinan yang terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya dalam suatu sistem sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Bahkan, seringkali sistem tersebut justru memperburuk kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan.

1. Kemiskinan Alamiah: jenis kemiskinan ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam, prasarana umum yang tidak memadai, atau kondisi geografis seperti tanah yang tandus.
2. Kemiskinan Buatan: Kemiskinan ini lebih disebabkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang tidak merata, sehingga masyarakat tidak mampu mengakses sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang tersedia.

Menurut Nurkse (1961), fenomena lingkaran setan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menjerat masyarakat di negara-negara miskin. Nurkse menjelaskan bahwa rendahnya pendapatan riil mengakibatkan minimnya kemampuan masyarakat untuk menabung dan terbatasnya modal yang tersedia untuk investasi. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas, yang kemudian kembali menekan pendapatan. Siklus ini terus berputar, membuat masyarakat miskin sulit untuk lepas dari jerat kemiskinan tanpa adanya intervensi atau bantuan dari pihak luar (Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. 2016).

2.2.3 Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Secara lebih rinci, penganggur dalam Survei Angkatan Kerja Nasional mencakup, Individu yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, Individu yang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, Individu yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan Individu yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, atau tidak mempersiapkan usaha karena telah diterima bekerja tetapi belum memulai pekerjaan tersebut (BPS, 2022). Menurut Bellante dan Jackson (1990), berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dikategorikan menjadi:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat kesulitan sementara dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan

yang tersedia. Hal ini sering disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau mahal biaya untuk memperoleh informasi tersebut. Pengangguran ini juga dikenal sebagai pengangguran normal.

2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh lowongan pekerjaan, atau karena lokasi pekerjaan yang tersedia berada di wilayah geografis yang berbeda dari tempat tinggal penganggur.
3. Pengangguran akibat kurangnya permintaan, yaitu pengangguran yang muncul karena pada tingkat upah dan harga yang berlaku, permintaan tenaga kerja secara keseluruhan terlalu rendah. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perekonomian lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Pengangguran umumnya diartikan sebagai kondisi dimana seseorang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan (Franita, R., *et al.*, 2016). Pengangguran dapat dibagi menjadi tiga :

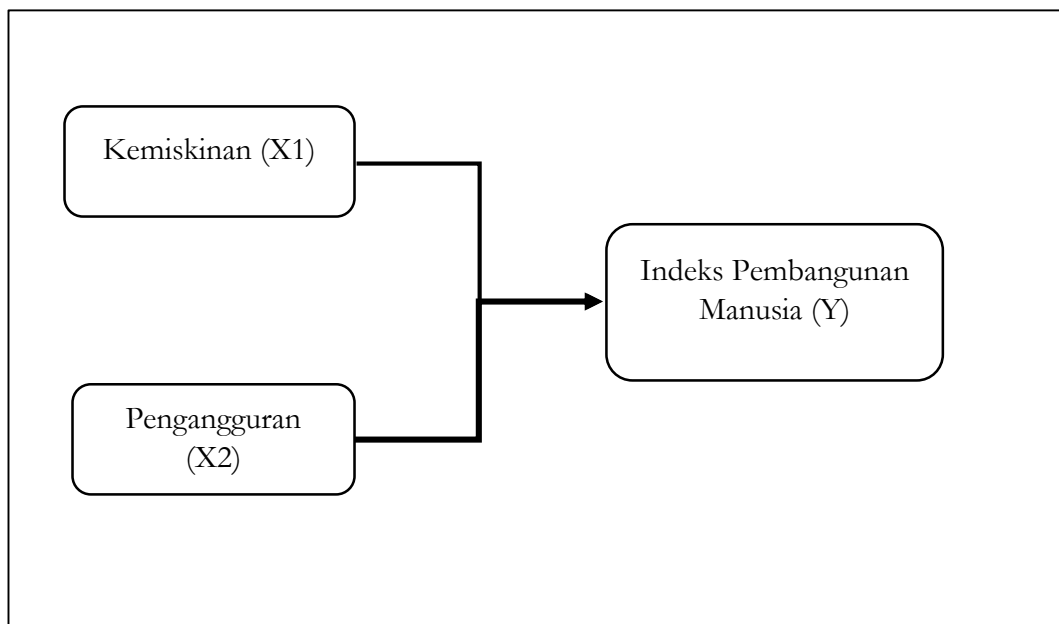
1. Pengangguran Terselubung, yaitu kondisi dimana tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena alasan tertentu, meskipun mereka masih terlibat dalam suatu pekerjaan.
2. Setengah Menganggur, yaitu kondisi dimana tenaga kerja yang bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu).
3. Pengangguran terbuka, yaitu kondisi dimana tenaga kerja benar benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

Menurut Sukirno (1995), dampak negatif yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran terhadap perekonomian meliputi (BPS, 2022):

1. Pengangguran menghambat tercapainya tingkat kemakmuran maksimal yang seharusnya dapat diraih oleh masyarakat.
2. Pengangguran mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak.
3. Pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, terdapat variabel X yang meliputi Kemiskinan dan Pengangguran, adapun variabel Y meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan latar belakang yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2023.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.4 Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Hubungan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan adalah masalah yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut teori Nurkse (1961), kemiskinan menciptakan lingkaran setan di mana rendahnya pendapatan membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang bergizi, layanan kesehatan yang baik, dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini berdampak buruk pada angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat

pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam perhitungan IPM. Selain itu, kemiskinan juga membatasi pengeluaran riil per kapita, yang menggambarkan standar hidup layak. Sebagian besar pendapatan rumah tangga miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan papan, sehingga hampir tidak ada sisa untuk investasi dalam pendidikan atau kesehatan. Tingkat kemiskinan yang tinggi juga mencerminkan adanya ketidakberdayaan dan kerentanan dalam masyarakat. Masyarakat miskin seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap informasi, peluang ekonomi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

2.4.2 Hubungan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengangguran adalah masalah ekonomi yang kompleks dan berdampak besar pada penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Sukirno (1995), pengangguran menghambat tercapainya tingkat kemakmuran, mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara individu, pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan, yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Hilangnya pekerjaan juga dapat menyebabkan tekanan psikologis dan menurunkan kesejahteraan, yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakefisienan pasar tenaga kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, atau kurangnya investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Hal ini mengurangi pengeluaran riil per kapita, yang merupakan salah satu komponen perhitungan IPM. Selain itu, pengangguran juga dapat meningkatkan angka kriminalitas dan ketidakstabilan sosial, ini menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

2.4.3 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan pengangguran adalah dua masalah sosial ekonomi yang saling terkait dan bersama-sama berdampak buruk pada Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Kemiskinan menyebabkan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, yang meningkatkan risiko pengangguran. Sebaliknya, pengangguran memperburuk kondisi kemiskinan karena hilangnya pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kedua masalah ini saling memperkuat dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Kemiskinan dan pengangguran mempengaruhi semua dimensi IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan penurunan angka harapan hidup dan kesehatan, sementara pengangguran menyebabkan penurunan pengeluaran riil per kapita. Keduanya juga berdampak negatif pada capaian pendidikan karena keluarga miskin dan pengangguran seringkali tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah, semakin rendah nilai IPM nya.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari teori diatas, hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Diduga Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Sementara itu, untuk variabel independennya terdiri dari Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup ;

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.
2. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yang menggabungkan antara perhitungan *time series* dengan *cross section*.

1. *Time series*

Pada perhitungan ini digunakan data selama 16 tahun, yaitu dari tahun 2008–2023.

2. *Cross section*

Pada perhitungan ini terdapat 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten atau kota tersebut adalah Kabupaten Banjarnegara, Banyumas (Purwokerto), Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan (Purwodadi), Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang (Mungkid), Pati, Pekalongan (Kajen), Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang (Ungaran), Sragen, Sukoharjo, Tegal (Slawi), Temanggung, Wonogiri, Wonosobo dan Kota Magelang, kota Pekalongan, kota Salatiga, kota Semarang, kota Surakarta (Solo), dan kota Tegal. Data ini diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2008-2023. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi pustaka, dimana peneliti mempelajari teori-teori yang terdapat dalam buku-buku serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Analisis yang

dilakukan disesuaikan dengan konteks penelitian ini. Selain itu, sumber-sumber lain yang relevan juga digunakan untuk mendukung pengumpulan data dan materi yang diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberi landasan yang lebih kuat dan mendalam terhadap analisis yang dilakukan.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y)

Variabel dependen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) dengan menggunakan data metode lama dan metode baru di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2023. IPM merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, maupun dalam aspek ekonomi. Indeks ini berfungsi sebagai alat untuk membandingkan sumberdaya manusia berdasarkan indikator seperti angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan standar hidup di suatu daerah. Semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia, maka semakin baik pula kualitas hidup dan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2 Tingkat Kemiskinan (X1)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2023. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang memiliki penghasilan dibawah standar kelayakan hidup atau dibawah garis kemiskinan, yang mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kemiskinan mencerminkan keadaan dimana individu atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk uang maupun barang tertentu. Tingkat kemiskinan ini dapat diukur dengan menggunakan satuan persen.

3.2.3 Tingkat Pengangguran (X2)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2023. Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi dimana individu atau kelompok yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh lapangan kerja yang layak. Tingkat pengangguran ini dapat diukur dengan menggunakan satuan persen.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Regresi model data panel merupakan metode analisis statistik yang menggabungkan data deret waktu dengan data *cross-sectional*. Regresi ini menggunakan data panel dan memberikan manfaat, termasuk penyediaan data yang lebih banyak, sehingga menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar. Analisis data panel ini memakai persamaan regresi sebagai berikut (Napitupulu, *et al.*, 2021):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ it} + \beta_2 X_{2\ it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.

X_1 : Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (persentase).

X_2 : Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah (persentase).

β_0 : Konstanta.

β_1, β_2 : Koefisien regresi untuk X_1 dan X_2 .

ϵ : Error (variabel gangguan).

i : 35 Kabupaten/Kota.

t : *Times* (2008-2023).

Dalam analisis regresi data panel, ada tiga pendekatan yang umum digunakan, yaitu estimasi *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pemilihan metode tersebut

disesuaikan dengan karakteristik data serta tingkat hubungan antar variabel yang diamati dalam penelitian (Napitupulu, *et al.*, 2021).

1. Metode *Common Effect Model* (CEM)

Metode yang digunakan adalah model regresi *Common Effect*. Pendekatan ini merupakan teknik sederhana untuk mengestimasi data panel, yaitu dengan menggabungkan data *cross-section* dan deret waktu (*time series*), tanpa mempertimbangkan perbedaan antara waktu dan individu. Model ini diestimasi menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary least squares/OLS*). Dengan kata lain, model ini menggambarkan perilaku data yang serupa di berbagai interval waktu.

2. Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini berasumsi bahwa ruang dan waktu antar koefisien regresi (*slope*) tetap. Dalam model *Fixed Effect*, kita dapat menggunakan variabel dummy untuk memperjelas adanya perbedaan pada intersep. Model estimasi ini biasanya disebut dengan *Least Squares Dummy (LSDV)*. Pada saat heteroskedastisitas, dapat menerapkan model *fixed effect* dengan *cross-section weight*.

3. Metode *Random Effect Model* (REM)

Metode *random effect model* ini digunakan untuk melakukan estimasi pada data panel, di mana variabel gangguan dapat saling berhubungan antara waktu dan individu. *Random effect model* memberikan pemahaman bahwa alasan memasukkan variabel dummy ke dalam model *fixed effect* adalah untuk menggantikan model yang tidak diketahui. Namun, terdapat konsekuensi yang dapat mengurangi derajat kebebasan, yang berdampak pada penurunan efisiensi parameter. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan *error term* yang dikenal dengan metode *random effect*.

3.4 Pemilihan Model dalam Pengolahan Data

Untuk memperoleh model terbaik, perlu ditentukan model mana yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian tersebut dan diuji secara formal melalui Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier* (Kusumaningtyas, *et al.*, 2022).

1) Uji *Chow*

Uji *Chow* bertujuan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Uji ini digunakan untuk membandingkan model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect*. Teori dari *chow test* adalah:

H_0 : F statistic < F tabel, maka model *Common Effect* lebih baik.

H_a : F statistic > F tabel, maka model *Fixed Effect* lebih baik.

Jika nilai *Chow Statistic* (F Statistic) yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis nol diterima, sehingga model yang dipilih dan digunakan adalah model *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai *Chow Statistic* (F Statistic) lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nol ditolak, dan model yang dipilih dan digunakan adalah model *Fixed Effect*.

2) Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan sebagai pengujian untuk memilih model yang terbaik yaitu antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Meskipun demikian, penggunaan metode *random effect* juga harus memperhatikan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi yang berlaku pada setiap komponen error. Penentuan hasil uji *Hausman* dilakukan dengan membandingkan nilai statistik *chi-square* dengan nilai kritis *chi-square*, dengan derajat kebebasan (df) yang setara dengan k (jumlah variabel independen). Dengan hipotesis:

H_0 : Model *random effect* lebih baik.

H_a : Model *fixed effect* lebih baik.

Jika nilai statistik uji *Hausman* lebih kecil dari nilai kritisnya, maka hipotesis nol diterima, dan model yang sesuai adalah model *random effect*. Sebaliknya, Jika nilai statistik uji *Hausman* lebih besar dari nilai kritisnya, maka hipotesis nol ditolak, dan model yang sesuai adalah model *fixed effect*.

3) Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common effect Model* lebih baik.

H_a : *Random effect Model* lebih baik.

Uji signifikansi ini diperkenalkan oleh Breusch-Pagan. Penentuan model terbaik dilakukan dengan membandingkan hasil Uji *Lagrange Multiplier (LM)* hitung dengan Chi-square. Jika nilai uji ini lebih kecil dari 0.05, maka model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah *Random Effects Model*. Sebaliknya jika nilainya dalam uji *Lagrange Multiplier (LM)* lebih besar dari 0.05, maka model yang terpilih yaitu *Common Effect Model*.

3.5 Pengujian Statistik

3.5.1 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. H_a diterima: Variabel independen memberikan pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai koefisien F hitung $< 0,05$ dan F hitung $>$ nilai F tabel, maka H_0 ditolak (H_a diterima).
2. H_0 diterima: Variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai koefisien F hitung $> 0,05$ dan F hitung $<$ nilai F tabel, maka H_a ditolak (H_0 diterima).

3.5.2 Uji t

Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji t. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. H_a diterima: Variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas t hitung $< 0,05$ dan t hitung $>$ t tabel, maka hipotesis H_0 ditolak (H_a diterima).
2. H_0 diterima: Variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas t hitung $> 0,05$ dan t hitung $<$ t tabel, maka hipotesis H_a ditolak (H_0 diterima).

3.5.3 Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Koefisien Determinasi (*R-Squared*) yang dinotasikan R^2 , bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta sejauh mana variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai *R-Squared* berada diantara nilai 0 dan 1. Ini juga berfungsi untuk menilai seberapa baik model regresi yang digunakan. Jika nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) mendekati angka satu (1), maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dijelaskan dengan baik oleh variabel independennya. Sebaliknya, jika nilai *R-Squared* semakin menjauh dari satu (1) atau mendekati nol (0), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kurang efektif dalam menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008–2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang diterapkan adalah metode data panel, yang menggabungkan data *time series* dan *cross-section*. Data *time series* mencakup periode tahun 2008–2023, sedangkan data *cross-section* meliputi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel independen terdiri dari tingkat kemiskinan dan pengangguran. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan alat analisis ekonometrika *EViews 12*.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil pengujian statistika deskriptif atas variabel Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dan total keseluruhan data. Data statistik deskriptif ini telah diolah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

	IPM	Kemiskinan	Pengangguran
Mean	71.50913	13.13145	5.733054
Maximum	84.99000	27.87000	15.74000
Minimum	60.78000	3.980000	1.500000
Std. Dev.	4.348799	4.816017	2.203121
Observations	560	560	560

Sumber: Data diolah Eviews 12

Berdasarkan Tabel 4.1, dari hasil pengujian diatas, menunjukkan bahwa jumlah data yang diuji pada penelitian berjumlah 560 observasi. Pada variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diketahui bahwa nilai rata-rata sebesar 71.50913 (71.51%) dan standar deviasi sebesar 4.348799 (4.35%). Nilai maksimum dari variabel IPM sebesar 84.99000 (84.99%) yaitu di Kota Salatiga pada tahun 2023, sedangkan nilai minimumnya 60.78000 (60.78%) yaitu di Kabupaten Pemalang pada tahun 2012.

Untuk variabel independen, tingkat kemiskinan memiliki rata-rata 13.13145 (13.13%) dan standar deviasi sebesar 4.816017 (4.82%), dengan nilai maksimum sebesar 27.87000 (27.87%) yaitu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 dan nilai minimum 3.980000 (3.98%) yaitu di Kota Semarang pada tahun 2019.

Variabel tingkat pengangguran menunjukkan rata-rata 5.733054 (5.73%), dan standar deviasi 2.203121 (2.20%), dimana nilai maksimumnya mencapai 15.74000 (15.74%) yaitu di Kota Tegal pada tahun 2009 dan minimumnya 1.500000 (1.50%) yaitu di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015.

4.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, pemilihan model regresi dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel. Ada tiga model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effects Model*, *Fixed Effects Model*, dan *Random Effects Model*. Untuk menentukan model regresi yang paling sesuai, dilakukan serangkaian pengujian statistik, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Chow* digunakan untuk membandingkan dan memilih antara *Common Effects Model* dan *Fixed Effects Model*. Uji *Hausman* diterapkan untuk membandingkan dan memilih antara *Random Effects Model* dan *Fixed Effects Model*. Sedangkan Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih model yang terbaik antara CEM (*Common Effect Model*) dan *Random Effect Model* (REM).

4.3.1 Pengujian Menggunakan *Common Effects Model*, *Fixed Effects Model*, dan *Random Effects Model*.

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan menerapkan tiga model analisis, seperti *Common Effects Model*, *Fixed Effects Model*, dan *Random Effects Model*.

Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel menggunakan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Variabel		CEM	FEM	REM
C	Coefficient	77.16493	73.03946	73.53234
	Prob.	0.0000	0.0000	0.0000
Kemiskinan	Coefficient	-0.505245	-0.098798	-0.157512
	Prob.	0.0000	0.0136	0.0000
Pengangguran	Coefficient	0.170728	-0.040636	0.007873
	Prob.	0.0139	0.5211	0.8977
R-squared		0.316432	0.777415	0.034127
F-statistic		128.9209	50.74062	9.840043
Prob.(F-stat)		0.000000	0.000000	0.000063
Observations		560	560	560

Sumber: Data diolah Eviews 12

Hasil estimasi dari ketiga model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), menunjukkan bahwa variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai konstanta memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat 1% dalam seluruh model, dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai koefisien IPM dalam ketiga model masing-masing adalah 77.16493 (7.716%) untuk CEM, 73.03946 (7.303%) untuk FEM, dan 73.53234 (7.353%) untuk REM.

Untuk variabel kemiskinan, hasil estimasi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dalam ketiga model. Koefisien kemiskinan dalam model CEM sebesar -0.505245 (50.5245%), dalam model FEM sebesar -0.098798 (9.8798%), dan dalam model REM sebesar -0.157512 (15.7512%), dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0.0000, 0.0136 (1.36%), dan 0.0000. Ini menunjukkan bahwa peningkatan angka kemiskinan cenderung menurunkan nilai IPM secara signifikan.

Berbeda halnya dengan variabel pengangguran, yang menunjukkan pengaruh tidak konsisten terhadap IPM. Dalam model CEM, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar 0.170728 (17.0728%) dan nilai probabilitas 0.0139 (1.39%). Namun, dalam model FEM dan REM, pengaruh

pengangguran tidak signifikan secara statistik, dengan koefisien masing-masing dalam model FEM sebesar -0.040636 (4.0636%) dan dalam model REM sebesar 0.007873, serta nilai probabilitas sebesar 0.5211 (52.11%) dan 0.8977 (89.77%).

Dari sisi kemampuan model menjelaskan variasi data, model FEM menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai *R-squared* tertinggi sebesar 0.777415. Artinya, sekitar 77.7415% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh variabel kemiskinan dan pengangguran dalam model FEM. Sementara itu, model CEM memiliki nilai *R-squared* sebesar 0.316432 (31,6432%), dan model REM menunjukkan nilai terendah sebesar 0.034127 (3.4127%). Nilai *F-statistic* pada ketiga model menunjukkan bahwa seluruh model signifikan secara simultan, terlihat dari nilai probabilitas *F-statistic* yang sangat kecil (0.000000 untuk CEM dan FEM, serta 0.000063 untuk REM). Jumlah observasi pada ketiga model sama, yaitu sebanyak 560.

Setelah data diolah menggunakan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih model terbaik.

4.3.2 Uji *Chow*

Uji ini digunakan untuk memilih model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect*. Teori dari chow test adalah:

H_0 : $F \text{ statistic} < F \text{ tabel}$, maka model *Common Effect* lebih baik.

H_a : $F \text{ statistic} > F \text{ tabel}$, maka model *Fixed Effect* lebih baik.

Jika nilai *Chow Statistic* (F Statistik) yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari $F \text{ tabel}$, maka hipotesis nol diterima, sehingga model yang dipilih dan digunakan adalah model *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai *Chow Statistic* (F Statistik) lebih besar dari $F \text{ tabel}$, maka hipotesis nol ditolak, dan model yang dipilih dan digunakan adalah model *Fixed Effect*.

Tabel 4. 3 Uji Chow

Effects Test	<i>Statistic</i>	d.f.	Prob.
<i>Cross-section F</i>	31.857486	(34,523)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	628.329324	34	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 12

Dari hasil pengujian Uji *Chow*, dihasilkan nilai Prob. *Cross-section F* adalah 0.0000 yang mana lebih kecil dari alpha 5% atau ($0.0000 < 0.05$) yang artinya menerima H_a atau menolak H_0 . Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan didapatkan bahwa model yang lebih tepat adalah model FEM (*fixed effect model*) dibandingkan dengan model CEM (*Common Effect Model*).

4.3.3 Uji *Hausman*

Uji ini digunakan untuk memilih model *Random Effect* dengan model *Fixed Effect*. Uji *Hausman* memiliki hipotesis berikut:

H_0 : Model *random effect* lebih baik.

H_a : Model *fixed effect* lebih baik.

Ketika probabilitas *cross section* kurang dari alpha (5%) maka menolak H_0 dan menerima H_a , dan sebaiknya, apabila lebih dari alpha (5%) maka H_0 diterima dan menolak H_a .

Tabel 4. 4 Uji Hausman

Test Summary	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	Prob.
<i>Cross-section random</i>	19.200134	2	0.0001

Sumber: Data diolah Eviews 12

Dari Hasil pengujian Uji *Hausman*, dihasilkan nilai Prob. *Cross-section random* adalah 0.0001 yang mana lebih kecil dari alpha 5% atau ($0.0001 < 0.05$) yang artinya

menerima H_a atau menolak H_o . Maka dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan didapatkan bahwa model yang lebih tepat adalah model FEM (*fixed effect model*) dibandingkan dengan model *Random Effect Model* (REM). Kedua uji ini menunjukkan bahwa model FEM (*fixed effect model*) adalah model terbaik.

4.3.4 Uji *Lagrange Multiplier*

Dalam penelitian ini, Uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak dilakukan karena pemilihan model telah ditentukan berdasarkan hasil Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, yang secara konsisten menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling tepat. Nilai probabilitas dari Uji *Chow* ($0,0000 < 0,05$) dan Uji *Hausman* ($0,0001 < 0,05$) signifikan pada tingkat alpha 5%, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) yang terbaik, dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM) maupun *Random Effect Model* (REM). Oleh karena itu, Uji LM yang bertujuan untuk membandingkan antara CEM dan REM tidak dilakukan dalam analisis ini.

4.4 Model Terbaik

Hasil analisis regresi data panel yang dilakukan melalui uji *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut adalah hasil estimasi dari model *Fixed Effect* tersebut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.03946	0.503457	145.0759	0.0000
Kemiskinan	-0.098798	0.039906	-2.475788	0.0136
Pengangguran	-0.040636	0.063292	-0.642045	0.5211
<i>F-statistic</i>	50.74062			
<i>Prob.(F-stat)</i>	0.000000			
<i>R-squared</i>	0.777415			

Sumber: Data diolah Eviews 12

Dari hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) yang telah dilakukan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_2 \text{Pengangguran}_{it} + \epsilon_{it}$$

$$\text{IPM} = 73.03946 - 0.098798 \text{Kemiskinan} - 0.040636 \text{Pengangguran} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.

β_0 : Konstanta.

β_1, β_2 : Koefisien regresi untuk Kemiskinan dan Pengangguran.

ϵ : Error (variabel gangguan).

i : 35 Kabupaten/Kota.

t : *Times* (2008-2023).

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini, uji simultan (uji F) dilakukan untuk mendeteksi apakah variabel independen secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Keputusan berdasarkan pada besaran probabilitas (*F-statistic*). Apabila nilai probabilitas $< \alpha$ 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas $> \alpha$ 0.05 (5%), menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari pengujian uji F:

Tabel 4. 6 Hasil Uji F

<i>F-statistic</i>	50.74062
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Data diolah Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi pada tabel tersebut, ditemukan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 50.74062 dan nilai prob.(*F-statistic*) lebih kecil dari α (5%) $0.000000 < 0.05$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Independen (Kemiskinan, Pengangguran) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama dan signifikan terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini, uji parsial (uji t) digunakan untuk mengukur seberapa besar setiap variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Pengukuran uji t ini dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Apabila nilai probabilitas $< \alpha$ 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas $> \alpha$ 0.05 (5%), menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari pengujian signifikansi uji t:

Tabel 4. 7 Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.03946	0.503457	145.0759	0.0000
Kemiskinan	-0.098798	0.039906	-2.475788	0.0136
Pengangguran	-0.040636	0.063292	-0.642045	0.5211

Sumber: Data diolah Eviews 12

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien variabel Kemiskinan sebesar -0.098798, jika nilai variabel lain konstan dan variabel mengalami peningkatan 1%, maka variabel IPM (Y) akan mengalami penurunan sebesar 9.8798%. Hasil uji t pada variabel Kemiskinan diperoleh nilai *t-Statistic* sebesar 2.475788 dan nilai probabilitas untuk variabel

kemiskinan adalah 0.0136, karena hubungannya satu sisi maka nilai probabilitasnya $0.0136 / 2 = 0.0068$. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.0068 < 0.05$), artinya variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Hasil uji t pada variabel Pengangguran diperoleh nilai *t-Statistic* sebesar 0.642045 dan nilai probabilitas untuk variabel pengangguran adalah 0.5211, karena hubungannya satu sisi maka nilai probabilitasnya $0.5211 / 2 = 0.26055$. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.26055 > 0.05$), artinya variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (*R-Squared* atau R^2), menunjukkan seberapa besar ketepatan model fungsi regresi menggambarkan variasi dari variabel dependen, sedangkan selebihnya disebabkan oleh faktor lain di luar penelitian. Nilai *R-Squared* berada diantara nilai 0 dan 1. Ini juga berfungsi untuk menilai seberapa baik model regresi yang digunakan. Jika nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) mendekati angka satu (1), maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dijelaskan dengan baik oleh variabel independennya. Sebaliknya, jika nilai *R-Squared* semakin menjauh dari satu (1) atau mendekati nol (0), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kurang efektif dalam menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi data, diperoleh hasil bahwa variabel independen yaitu Kemiskinan dan Pengangguran, berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah melalui *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), menunjukkan nilai R^2 Sebesar 0.777415 atau 77.7415%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukan bahwa variabel independen yang terdiri dari Kemiskinan Dan Pengangguran mampu menjelaskan variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 77.7415%, sedangkan sisanya yaitu 22.2585% ($100 - \text{nilai } R^2$) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Variabel Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh nilai probabilitas pada variabel Kemiskinan sebesar 0.0136, karena hubungannya satu sisi maka nilai probabilitasnya $0.0136 / 2 = 0.0068$. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.0068 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien untuk variabel Kemiskinan adalah -0.098798, yang berarti bahwa jika tingkat kemiskinan meningkat sebesar 1%, maka IPM akan mengalami penurunan sebesar 0.098798 (9.8798%).

Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nurkse (1961), yang menyatakan bahwa kemiskinan menciptakan lingkaran setan kemiskinan, di mana rendahnya pendapatan menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Hal ini pada akhirnya berdampak negatif terhadap peningkatan IPM. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesis awal dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abie Rachman Muhamad dan Dewi Rahmi (2023) di Provinsi Jawa Barat, yang menyimpulkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM, karena tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian ini memperkuat bahwa di wilayah seperti Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, yang merupakan komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks ini, teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh

Nurkse (1961) menjadi sangat relevan, di mana rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya investasi dalam sumber daya manusia, sehingga memperparah kemiskinan itu sendiri. Selain itu, kemiskinan menurunkan daya beli dan menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, prioritas masyarakat cenderung tertuju pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga aspek-aspek jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan sering kali terabaikan. Akibatnya, peningkatan kualitas hidup menjadi sulit dicapai secara merata di seluruh daerah.

4.6.2 Pengaruh Variabel Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh nilai probabilitas untuk variabel Pengangguran sebesar 0.5211, karena hubungannya satu sisi maka nilai probabilitasnya $0.5211 / 2 = 0.26055$. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.26055 > 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno (1995), yang menjelaskan bahwa pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kualitas hidup, yang pada akhirnya berdampak pada turunnya IPM. Secara teori, pengangguran seharusnya memiliki dampak terhadap pembangunan manusia karena berkaitan dengan daya beli dan akses terhadap layanan dasar. Namun, meskipun bertentangan dengan teori, hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, dan Hendriana Trifonia Lau (2021), yang meneliti di Kabupaten Belu. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa dalam konteks tertentu, seperti di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, pengangguran belum menjadi faktor utama yang memengaruhi pembangunan manusia. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya aktivitas di sektor informal, di mana banyak masyarakat tetap bekerja meskipun tidak

tercatat secara resmi sebagai tenaga kerja formal. Selain itu, keberadaan berbagai program bantuan sosial dan intervensi pemerintah, seperti jaminan kesehatan, bantuan tunai, dan subsidi pendidikan, berperan dalam menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dengan demikian, meskipun tingkat pengangguran tinggi, dimensi-dimensi IPM seperti pendidikan dan kesehatan tetap dapat dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran terhadap IPM dapat ditekan oleh faktor-faktor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat, yang mampu mengurangi dampak negatif dari pengangguran, sehingga pengaruh langsungnya terhadap IPM menjadi tidak signifikan.

4.6.3 Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi pada tabel tersebut, ditemukan bahwa nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari α (5%) $0,000000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Meskipun variabel pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan, hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa keterkaitan antara kedua variabel tersebut dapat memperbesar dampaknya terhadap pembangunan manusia. Hasil ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah dua permasalahan sosial ekonomi yang saling berkaitan dan bersama-sama dapat menurunkan kualitas hidup serta pembangunan manusia.

Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda (2020), yang menyimpulkan bahwa kemiskinan dan pengangguran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya meningkatkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi kemudian menghambat akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga kualitas sumber daya

manusia menurun. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini mendukung pandangan bahwa di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, kombinasi antara kemiskinan dan pengangguran memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembangunan manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2023", dengan menggunakan analisis regresi data panel, ditemukan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan: Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka cenderung semakin rendah nilai IPM nya.
2. Tingkat Pengangguran: Berdasarkan hasil pengujian, tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Meskipun secara teori pengangguran memiliki potensi untuk menurunkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dalam konteks penelitian ini, variabel tersebut belum terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap IPM. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya peran sektor informal atau adanya intervensi program bantuan pemerintah yang mampu mengurangi dampak negatif pengangguran.
3. Variabel tingkat kemiskinan dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan, secara bersama-sama dengan kemiskinan, kedua variabel tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa keterkaitan antara kedua variabel tersebut dapat memperbesar dampaknya terhadap pembangunan manusia di daerah tersebut.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, implikasi yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kemiskinan, upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah perlu merancang program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Program-program bantuan sosial yang tepat sasaran juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan IPM. Dengan menurunkan tingkat kemiskinan, diharapkan IPM dapat meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Tingkat Pengangguran, upaya pengentasan pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pada penguatan sektor informal dan peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, mengingat sebagian masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal tetap produktif melalui kegiatan ekonomi informal. Namun, karena pekerja sektor informal tidak tercatat sebagai tenaga kerja formal, data pengangguran menjadi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mendorong transisi tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal melalui penyediaan pelatihan keterampilan, peningkatan akses pendidikan, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi dan *soft skill* yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja formal, agar penurunan angka pengangguran dapat lebih nyata tercermin dalam statistik ketenagakerjaan dan berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Selain itu, program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, dan bantuan tunai perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat rentan. Upaya ini penting untuk menjaga akses terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas

hidup, dan memastikan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah meskipun pengangguran tidak secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

- 3) Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan manusia melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, I., & Rohimah, S. (2019). Analisis jalur untuk pengaruh angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengeluaran Riil Per Kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 2(1), 76.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html> , pada tanggal 23 Oktober 2024
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html> , pada tanggal 08 Oktober 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021*. Diakses dari <https://sulbar.bps.go.id/id/publication/2022/09/16/e6401b36f02b67736a37ee4c/statistik-angkatan-kerja-provinsi-sulawesi-barat-2021.html> , pada tanggal 28 Desember 2024
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia-ipm--indonesia-tahun-2023> , pada tanggal 6 November 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/01/1457/indeks->

- [pembangunan-manusia--ipm--jawa-tengah-2023.html](https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODIjMg==/jumlah-angkatan-kerja.html) , pada tanggal 6 November 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODIjMg==/jumlah-angkatan-kerja.html> , pada tanggal 25 Februari 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan 2023*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/1454/kemiskinan-provinsi-jawa-tengah-maret-2023.html> , pada tanggal 6 November 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengangguran 2023*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/1452/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-jawa-tengah-agustus-2023.html> , pada tanggal 10 November 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Diakses dari <https://paserkab.bps.go.id/id/publication/2024/10/01/2671d8b97a594ed79f9e65b0/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-paser-2023.html> , pada tanggal 22 Desember 2024.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal ekonomi*, 22(2), 1-12.
- Faizin, M. (2021). Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 214-227.
- Fajri, R. H. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 212-222.
- Fatimah, S. N. (2018). Analisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2010-2015.
- Franita, R., Harahap, A. F. D., & Sukriah, Y. (2016). Analisa pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(3), 88-93.

- Handayani, N. (2024). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 26-36.
- Izzah, N. (2015). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Riau tahun 1994-2013. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 156-172.
- Kasnelly, S., & Wardiah, J. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II).
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di kabupaten belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60-84.
- Kusumaningtyas, E., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., & Syah, S. (2022). *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eview* (Vol. 1). Academia Publication.
- Muhamad, A. R., & Rahmi, D. (2023). Pengaruh Teknologi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jabar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 45-52.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumban Tobing, C. E. R. (2021). Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap

- indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran setan kemiskinan dalam masyarakat pedesaan, studi kasus petani tembakau di kawasan pedesaan pulau Lombok. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 120-127.
- Primandari, N. R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004–2018. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 25-34.
- Putri, S. S. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota DKI Jakarta Tahun 2017-2021. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 39-51.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Susilo, J. H., Kholilurrohman, M., & Hasan, Z. (2020). Analisis indeks pembangunan Manusia di provinsi Papua. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 172-187.
- Zakaria, R. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/18/25 Time: 15:30

Sample: 2008 2023

Periods included: 16

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 560

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	77.16493	0.582614	132.4461	0.0000
KEMISKINAN	-0.505245	0.031662	-15.95747	0.0000
PENGANGGURA				
N	0.170728	0.069213	2.466706	0.0139
Root MSE	3.592296	R-squared		0.316432
Mean dependent var	71.50913	Adjusted R-squared		0.313977
S.D. dependent var	4.348799	S.E. of regression		3.601957
Akaike info criterion	5.406175	Sum squared resid		7226.571
Schwarz criterion	5.429360	Log likelihood		-1510.729
Hannan-Quinn				
criter.	5.415228	F-statistic		128.9209
Durbin-Watson stat	0.211328	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 2 Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/18/25 Time: 15:32

Sample: 2008 2023

Periods included: 16

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 560

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.03946	0.503457	145.0759	0.0000
KEMISKINAN	-0.098798	0.039906	-2.475788	0.0136
PENGANGGURA				
N	-0.040636	0.063292	-0.642045	0.5211

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	2.049884	R-squared	0.777415
Mean dependent var	71.50913	Adjusted R-squared	0.762093
S.D. dependent var	4.348799	S.E. of regression	2.121155
Akaike info criterion	4.405586	Sum squared resid	2353.134
Schwarz criterion	4.691539	Log likelihood	-1196.564
Hannan-Quinn			
criter.	4.517244	F-statistic	50.74062
Durbin-Watson stat	0.603252	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 3 Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: IPM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/18/25 Time: 15:34

Sample: 2008 2023

Periods included: 16

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 560

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.53234	0.683764	107.5405	0.0000
KEMISKINAN	-0.157512	0.037505	-4.199798	0.0000
PENGANGGURA				
N	0.007873	0.061208	0.128626	0.8977
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.824122	0.6393
Idiosyncratic random			2.121155	0.3607
Weighted Statistics				
Root MSE	2.147880	R-squared		0.034127
Mean dependent var	13.19673	Adjusted R-squared		0.030658
S.D. dependent var	2.187450	S.E. of regression		2.153657
Sum squared resid	2583.499	F-statistic		9.840043
Durbin-Watson stat	0.547721	Prob(F-statistic)		0.000063
Unweighted Statistics				
R-squared	0.164033	Mean dependent var		71.50913

Sum squared resid	8837.707	Durbin-Watson stat	0.160114
-------------------	----------	--------------------	----------

Lampiran 4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: MODEL_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.857486	(34,523)	0.0000
Cross-section Chi-square	628.329324	34	0.0000

Lampiran 5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: MODEL_REM

Test cross-section random effects

Chi-Sq.			
Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.200134	2	0.0001

Lampiran 6. Model Terbaik Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/18/25 Time: 15:32

Sample: 2008 2023

Periods included: 16

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 560

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.03946	0.503457	145.0759	0.0000
KEMISKINAN	-0.098798	0.039906	-2.475788	0.0136
PENGANGGURA				
N	-0.040636	0.063292	-0.642045	0.5211
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	2.049884	R-squared		0.777415
Mean dependent var	71.50913	Adjusted R-squared		0.762093
S.D. dependent var	4.348799	S.E. of regression		2.121155
Akaike info criterion	4.405586	Sum squared resid		2353.134
Schwarz criterion	4.691539	Log likelihood		-1196.564
Hannan-Quinn				
criter.	4.517244	F-statistic		50.74062
Durbin-Watson stat	0.603252	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 7. Data Yang Diolah

Kabupaten / Kota	ID	Tahun	IPM	Kemiskinan	Pengangguran
Kabupaten Cilacap	1	2008	70.91	21.40	10.16
Kabupaten Cilacap	1	2009	71.39	19.88	11.45
Kabupaten Cilacap	1	2010	71.73	18.11	9.75
Kabupaten Cilacap	1	2011	72.34	17.15	10.82
Kabupaten Cilacap	1	2012	65.72	15.92	7.29
Kabupaten Cilacap	1	2013	66.80	15.24	6.68
Kabupaten Cilacap	1	2014	67.25	14.21	5.65
Kabupaten Cilacap	1	2015	67.77	14.39	8.01
Kabupaten Cilacap	1	2016	68.60	14.12	7.15
Kabupaten Cilacap	1	2017	68.90	13.94	6.3
Kabupaten Cilacap	1	2018	69.56	11.25	7.49
Kabupaten Cilacap	1	2019	69.98	10.73	7.24
Kabupaten Cilacap	1	2020	69.95	11.46	9.10
Kabupaten Cilacap	1	2021	70.42	11.67	9.97
Kabupaten Cilacap	1	2022	70.99	11.02	9.62
Kabupaten Cilacap	1	2023	71.83	10.99	8.74
Kabupaten Banyumas	2	2008	71.77	22.93	8.05
Kabupaten Banyumas	2	2009	72.27	21.52	8.05
Kabupaten Banyumas	2	2010	72.60	20.20	7.37
Kabupaten Banyumas	2	2011	72.96	21.11	6.61
Kabupaten Banyumas	2	2012	68.06	19.44	5.11
Kabupaten Banyumas	2	2013	68.55	18.44	5.45
Kabupaten Banyumas	2	2014	69.25	17.45	5.37
Kabupaten Banyumas	2	2015	69.89	17.52	6.37
Kabupaten Banyumas	2	2016	70.49	17.23	5.49
Kabupaten Banyumas	2	2017	70.75	17.05	4.62
Kabupaten Banyumas	2	2018	71.30	13.50	4.15
Kabupaten Banyumas	2	2019	71.96	12.53	4.17

Kabupaten Banyumas	2	2020	71.98	13.26	6.00
Kabupaten Banyumas	2	2021	72.44	13.66	6.05
Kabupaten Banyumas	2	2022	73.17	12.84	6.05
Kabupaten Banyumas	2	2023	73.86	12.53	6.35
Kabupaten Purbalingga	3	2008	70.89	27.12	7.08
Kabupaten Purbalingga	3	2009	71.51	24.97	4.66
Kabupaten Purbalingga	3	2010	72.07	24.58	3.82
Kabupaten Purbalingga	3	2011	72.50	23.06	5.10
Kabupaten Purbalingga	3	2012	64.94	21.19	5.02
Kabupaten Purbalingga	3	2013	65.53	20.53	5.63
Kabupaten Purbalingga	3	2014	66.23	19.75	5.13
Kabupaten Purbalingga	3	2015	67.03	19.70	4.84
Kabupaten Purbalingga	3	2016	67.48	18.98	5.08
Kabupaten Purbalingga	3	2017	67.72	18.80	5.33
Kabupaten Purbalingga	3	2018	68.41	15.62	6.02
Kabupaten Purbalingga	3	2019	68.99	15.03	4.73
Kabupaten Purbalingga	3	2020	68.97	15.90	6.10
Kabupaten Purbalingga	3	2021	69.15	16.24	6.05
Kabupaten Purbalingga	3	2022	69.54	15.30	5.23
Kabupaten Purbalingga	3	2023	70.24	14.99	5.61
Kabupaten Banjarnegara	4	2008	68.99	23.34	4.91
Kabupaten Banjarnegara	4	2009	69.63	21.36	5.07
Kabupaten Banjarnegara	4	2010	69.91	19.17	3.10
Kabupaten Banjarnegara	4	2011	70.39	20.38	4.97
Kabupaten Banjarnegara	4	2012	62.29	18.87	3.69

Kabupaten Banjarnegara	4	2013	62.84	18.71	4.16
Kabupaten Banjarnegara	4	2014	63.15	17.77	4.06
Kabupaten Banjarnegara	4	2015	64.73	18.37	5.05
Kabupaten Banjarnegara	4	2016	65.52	17.46	4.88
Kabupaten Banjarnegara	4	2017	65.86	17.21	4.72
Kabupaten Banjarnegara	4	2018	66.54	15.46	3.99
Kabupaten Banjarnegara	4	2019	67.34	14.76	4.44
Kabupaten Banjarnegara	4	2020	67.45	15.64	5.86
Kabupaten Banjarnegara	4	2021	67.86	16.23	5.86
Kabupaten Banjarnegara	4	2022	68.61	15.20	6.38
Kabupaten Banjarnegara	4	2023	69.14	14.90	6.26
Kabupaten Kebumen	5	2008	70.19	27.87	6.12
Kabupaten Kebumen	5	2009	70.73	25.37	8.12
Kabupaten Kebumen	5	2010	71.12	22.70	8.02
Kabupaten Kebumen	5	2011	71.62	24.06	4.73
Kabupaten Kebumen	5	2012	64.47	22.40	3.58
Kabupaten Kebumen	5	2013	64.86	21.32	3.52
Kabupaten Kebumen	5	2014	65.67	20.50	3.25
Kabupaten Kebumen	5	2015	66.87	20.44	4.14
Kabupaten Kebumen	5	2016	67.41	19.86	4.86

Kabupaten Kebumen	5	2017	68.29	19.60	5.58
Kabupaten Kebumen	5	2018	68.80	17.47	5.48
Kabupaten Kebumen	5	2019	69.60	16.82	4.69
Kabupaten Kebumen	5	2020	69.81	17.59	6.07
Kabupaten Kebumen	5	2021	70.05	17.83	6.03
Kabupaten Kebumen	5	2022	70.79	16.41	5.92
Kabupaten Kebumen	5	2023	71.37	16.34	5.11
Kabupaten Purworejo	6	2008	71.29	18.22	4.32
Kabupaten Purworejo	6	2009	71.88	17.02	4.94
Kabupaten Purworejo	6	2010	72.55	16.61	3.40
Kabupaten Purworejo	6	2011	72.91	17.51	5.30
Kabupaten Purworejo	6	2012	69.40	16.32	3.20
Kabupaten Purworejo	6	2013	69.77	15.44	5.15
Kabupaten Purworejo	6	2014	70.12	14.41	5.10
Kabupaten Purworejo	6	2015	70.37	14.27	4.01
Kabupaten Purworejo	6	2016	70.66	13.91	3.82
Kabupaten Purworejo	6	2017	71.31	13.81	3.64
Kabupaten Purworejo	6	2018	71.87	11.67	4.43
Kabupaten Purworejo	6	2019	72.50	11.45	2.91
Kabupaten Purworejo	6	2020	72.68	11.78	4.04
Kabupaten Purworejo	6	2021	72.98	12.40	3.59
Kabupaten Purworejo	6	2022	73.60	11.53	4.45
Kabupaten Purworejo	6	2023	74.28	11.33	4.02
Kabupaten Wonosobo	7	2008	69.55	27.72	5.50
Kabupaten Wonosobo	7	2009	70.08	25.91	3.62
Kabupaten Wonosobo	7	2010	70.52	23.15	4.04
Kabupaten Wonosobo	7	2011	71.06	24.21	4.92
Kabupaten Wonosobo	7	2012	64.18	22.50	5.21
Kabupaten Wonosobo	7	2013	64.57	22.08	5.82
Kabupaten Wonosobo	7	2014	65.20	21.42	5.34

Kabupaten Wonosobo	7	2015	65.70	21.45	4.47
Kabupaten Wonosobo	7	2016	66.19	20.53	4.32
Kabupaten Wonosobo	7	2017	66.89	20.32	4.18
Kabupaten Wonosobo	7	2018	67.81	17.58	3.50
Kabupaten Wonosobo	7	2019	68.27	16.63	3.43
Kabupaten Wonosobo	7	2020	68.22	17.36	5.37
Kabupaten Wonosobo	7	2021	68.43	17.67	5.26
Kabupaten Wonosobo	7	2022	68.89	16.17	5.01
Kabupaten Wonosobo	7	2023	69.37	15.58	4.95
Kabupaten Magelang	8	2008	71.43	16.49	5.06
Kabupaten Magelang	8	2009	71.76	15.19	4.95
Kabupaten Magelang	8	2010	72.08	14.14	2.97
Kabupaten Magelang	8	2011	72.69	15.18	6.83
Kabupaten Magelang	8	2012	64.75	13.97	4.38
Kabupaten Magelang	8	2013	65.86	13.96	6.13
Kabupaten Magelang	8	2014	66.35	12.98	7.45
Kabupaten Magelang	8	2015	67.13	13.07	5.16
Kabupaten Magelang	8	2016	67.85	12.67	3.8
Kabupaten Magelang	8	2017	68.39	12.42	2.44
Kabupaten Magelang	8	2018	69.11	11.23	2.89
Kabupaten Magelang	8	2019	69.87	10.67	3.07
Kabupaten Magelang	8	2020	69.87	11.27	4.27
Kabupaten Magelang	8	2021	70.12	11.91	5.03
Kabupaten Magelang	8	2022	70.85	11.09	4.97
Kabupaten Magelang	8	2023	71.45	10.96	4.42
Kabupaten Boyolali	9	2008	69.99	17.08	5.90
Kabupaten Boyolali	9	2009	70.44	15.96	5.51
Kabupaten Boyolali	9	2010	70.72	13.72	3.90
Kabupaten Boyolali	9	2011	71.25	14.97	5.81
Kabupaten Boyolali	9	2012	69.51	13.88	4.43

Kabupaten Boyolali	9	2013	69.81	13.27	5.44
Kabupaten Boyolali	9	2014	70.34	12.36	4.95
Kabupaten Boyolali	9	2015	71.74	12.45	2.03
Kabupaten Boyolali	9	2016	72.18	12.09	2.85
Kabupaten Boyolali	9	2017	72.64	11.96	3.67
Kabupaten Boyolali	9	2018	73.22	10.04	2.18
Kabupaten Boyolali	9	2019	73.80	9.53	3.09
Kabupaten Boyolali	9	2020	74.25	10.18	5.28
Kabupaten Boyolali	9	2021	74.40	10.62	5.09
Kabupaten Boyolali	9	2022	74.97	9.82	4.92
Kabupaten Boyolali	9	2023	75.41	9.81	4.05
Kabupaten Klaten	10	2008	72.93	21.72	7.26
Kabupaten Klaten	10	2009	73.41	19.68	6.36
Kabupaten Klaten	10	2010	73.83	17.47	4.50
Kabupaten Klaten	10	2011	74.10	17.95	7.63
Kabupaten Klaten	10	2012	71.71	16.71	3.70
Kabupaten Klaten	10	2013	72.42	15.60	5.34
Kabupaten Klaten	10	2014	73.19	14.56	4.75
Kabupaten Klaten	10	2015	73.81	14.89	2.51
Kabupaten Klaten	10	2016	73.97	14.46	3.43
Kabupaten Klaten	10	2017	74.25	14.15	4.35
Kabupaten Klaten	10	2018	74.79	12.96	3.14
Kabupaten Klaten	10	2019	75.29	12.28	3.54
Kabupaten Klaten	10	2020	75.56	12.89	5.46
Kabupaten Klaten	10	2021	76.12	13.49	5.48
Kabupaten Klaten	10	2022	76.95	12.33	4.31
Kabupaten Klaten	10	2023	77.59	12.28	4.20
Kabupaten Sukoharjo	11	2008	73.01	12.13	8.12
Kabupaten Sukoharjo	11	2009	73.29	11.51	8.28
Kabupaten Sukoharjo	11	2010	73.57	10.94	7.40

Kabupaten Sukoharjo	11	2011	73.97	11.13	6.27
Kabupaten Sukoharjo	11	2012	72.81	10.15	6.10
Kabupaten Sukoharjo	11	2013	73.22	9.87	5.98
Kabupaten Sukoharjo	11	2014	73.76	9.18	4.60
Kabupaten Sukoharjo	11	2015	74.53	9.26	4.52
Kabupaten Sukoharjo	11	2016	75.06	9.07	3.39
Kabupaten Sukoharjo	11	2017	75.56	8.75	2.27
Kabupaten Sukoharjo	11	2018	76.07	7.41	2.72
Kabupaten Sukoharjo	11	2019	76.84	7.14	3.39
Kabupaten Sukoharjo	11	2020	76.98	7.68	6.93
Kabupaten Sukoharjo	11	2021	77.13	8.23	3.32
Kabupaten Sukoharjo	11	2022	77.94	7.61	2.47
Kabupaten Sukoharjo	11	2023	78.65	7.58	3.40
Kabupaten Wonogiri	12	2008	70.47	20.71	5.73
Kabupaten Wonogiri	12	2009	71.04	19.08	5.03
Kabupaten Wonogiri	12	2010	71.33	15.67	4.70
Kabupaten Wonogiri	12	2011	71.86	15.74	3.82
Kabupaten Wonogiri	12	2012	65.75	14.67	3.46
Kabupaten Wonogiri	12	2013	66.40	14.02	3.61
Kabupaten Wonogiri	12	2014	66.77	13.09	3.45
Kabupaten Wonogiri	12	2015	67.76	12.98	3.07
Kabupaten Wonogiri	12	2016	68.23	13.12	2.72
Kabupaten Wonogiri	12	2017	68.66	12.90	2.38
Kabupaten Wonogiri	12	2018	69.37	10.75	2.28
Kabupaten Wonogiri	12	2019	69.98	10.25	2.55
Kabupaten Wonogiri	12	2020	70.25	10.86	4.27
Kabupaten Wonogiri	12	2021	70.49	11.55	2.43
Kabupaten Wonogiri	12	2022	71.04	10.99	1.95
Kabupaten Wonogiri	12	2023	71.97	10.94	1.92
Kabupaten Karanganyar	13	2008	72.21	15.68	5.70

Kabupaten Karanganyar	13	2009	72.55	14.73	8.26
Kabupaten Karanganyar	13	2010	73.19	13.98	6.62
Kabupaten Karanganyar	13	2011	73.82	15.29	5.78
Kabupaten Karanganyar	13	2012	72.26	14.07	5.82
Kabupaten Karanganyar	13	2013	73.33	13.58	3.84
Kabupaten Karanganyar	13	2014	73.89	12.62	3.54
Kabupaten Karanganyar	13	2015	74.26	12.46	3.6
Kabupaten Karanganyar	13	2016	74.90	12.49	3.38
Kabupaten Karanganyar	13	2017	75.22	12.28	3.17
Kabupaten Karanganyar	13	2018	75.54	10.01	2.28
Kabupaten Karanganyar	13	2019	75.89	9.55	3.12
Kabupaten Karanganyar	13	2020	75.86	10.28	5.96
Kabupaten Karanganyar	13	2021	75.99	10.68	5.89
Kabupaten Karanganyar	13	2022	76.58	9.85	5.70
Kabupaten Karanganyar	13	2023	77.31	9.79	4.35
Kabupaten Sragen	14	2008	69.57	20.83	5.64

Kabupaten Sragen	14	2009	70.27	19.70	5.78
Kabupaten Sragen	14	2010	71.00	17.49	4.09
Kabupaten Sragen	14	2011	71.33	17.95	8.43
Kabupaten Sragen	14	2012	68.91	16.72	5.88
Kabupaten Sragen	14	2013	69.95	15.93	5.63
Kabupaten Sragen	14	2014	70.52	14.87	6.04
Kabupaten Sragen	14	2015	71.10	14.86	4.51
Kabupaten Sragen	14	2016	71.43	14.38	4.53
Kabupaten Sragen	14	2017	72.40	14.02	4.55
Kabupaten Sragen	14	2018	72.96	13.12	4.83
Kabupaten Sragen	14	2019	73.43	12.79	3.32
Kabupaten Sragen	14	2020	73.95	13.38	4.75
Kabupaten Sragen	14	2021	74.08	13.83	4.76
Kabupaten Sragen	14	2022	74.65	12.94	4.69
Kabupaten Sragen	14	2023	75.10	12.87	3.87
Kabupaten Grobogan	15	2008	70.22	19.84	6.19
Kabupaten Grobogan	15	2009	70.60	18.68	6.07
Kabupaten Grobogan	15	2010	70.83	17.86	4.60
Kabupaten Grobogan	15	2011	71.27	17.38	5.33
Kabupaten Grobogan	15	2012	66.39	16.13	4.20
Kabupaten Grobogan	15	2013	67.43	14.87	6.10
Kabupaten Grobogan	15	2014	67.77	13.86	4.25
Kabupaten Grobogan	15	2015	68.05	13.68	5.22
Kabupaten Grobogan	15	2016	68.52	13.57	4.12
Kabupaten Grobogan	15	2017	68.87	13.27	3.02
Kabupaten Grobogan	15	2018	69.32	12.31	2.22
Kabupaten Grobogan	15	2019	69.86	11.77	3.54
Kabupaten Grobogan	15	2020	69.87	12.46	4.50
Kabupaten Grobogan	15	2021	70.41	12.74	4.38
Kabupaten Grobogan	15	2022	70.97	11.80	4.40

Kabupaten Grobogan	15	2023	71.49	11.72	4.02
Kabupaten Blora	16	2008	69.63	18.79	5.71
Kabupaten Blora	16	2009	70.14	17.70	6.99
Kabupaten Blora	16	2010	70.61	16.27	5.49
Kabupaten Blora	16	2011	71.25	16.24	6.90
Kabupaten Blora	16	2012	64.70	15.10	4.75
Kabupaten Blora	16	2013	65.37	14.64	6.23
Kabupaten Blora	16	2014	65.84	13.66	4.30
Kabupaten Blora	16	2015	66.22	13.52	4.68
Kabupaten Blora	16	2016	66.61	13.33	3.76
Kabupaten Blora	16	2017	67.52	13.04	2.85
Kabupaten Blora	16	2018	67.95	11.90	3.30
Kabupaten Blora	16	2019	68.65	11.32	3.82
Kabupaten Blora	16	2020	68.84	11.96	4.89
Kabupaten Blora	16	2021	69.37	12.39	3.81
Kabupaten Blora	16	2022	69.95	11.53	3.70
Kabupaten Blora	16	2023	70.63	11.49	3.10
Kabupaten Rembang	17	2008	71.12	27.21	5.89
Kabupaten Rembang	17	2009	71.55	25.86	5.64
Kabupaten Rembang	17	2010	72.07	23.40	4.89
Kabupaten Rembang	17	2011	72.45	23.71	7.22
Kabupaten Rembang	17	2012	66.03	21.88	5.75
Kabupaten Rembang	17	2013	66.84	20.97	5.97
Kabupaten Rembang	17	2014	67.40	19.50	5.23
Kabupaten Rembang	17	2015	68.18	19.28	4.51
Kabupaten Rembang	17	2016	68.60	18.54	3.85
Kabupaten Rembang	17	2017	68.95	18.35	3.19
Kabupaten Rembang	17	2018	69.46	15.41	2.83
Kabupaten Rembang	17	2019	70.15	14.95	3.60
Kabupaten Rembang	17	2020	70.02	15.60	4.83

Kabupaten Rembang	17	2021	70.43	15.80	3.67
Kabupaten Rembang	17	2022	71.00	14.65	1.76
Kabupaten Rembang	17	2023	71.89	14.17	2.60
Kabupaten Pati	18	2008	72.26	17.90	9.36
Kabupaten Pati	18	2009	72.72	15.92	7.68
Kabupaten Pati	18	2010	72.96	14.48	6.22
Kabupaten Pati	18	2011	73.49	14.69	11.17
Kabupaten Pati	18	2012	66.13	13.61	11.98
Kabupaten Pati	18	2013	66.47	12.94	7.29
Kabupaten Pati	18	2014	66.99	12.06	6.37
Kabupaten Pati	18	2015	68.51	11.95	4.43
Kabupaten Pati	18	2016	69.03	11.65	4.13
Kabupaten Pati	18	2017	70.12	11.38	3.83
Kabupaten Pati	18	2018	70.71	9.90	3.57
Kabupaten Pati	18	2019	71.35	9.46	3.64
Kabupaten Pati	18	2020	71.77	10.08	4.74
Kabupaten Pati	18	2021	72.28	10.21	4.60
Kabupaten Pati	18	2022	73.14	9.33	4.45
Kabupaten Pati	18	2023	73.59	9.31	4.29
Kabupaten Kudus	19	2008	72.02	12.58	6.15
Kabupaten Kudus	19	2009	72.57	10.80	7.36
Kabupaten Kudus	19	2010	72.95	9.01	6.22
Kabupaten Kudus	19	2011	73.24	9.45	8.32
Kabupaten Kudus	19	2012	70.57	8.63	5.89
Kabupaten Kudus	19	2013	71.58	8.62	8.07
Kabupaten Kudus	19	2014	72.00	7.99	5.03
Kabupaten Kudus	19	2015	72.72	7.73	5.04
Kabupaten Kudus	19	2016	72.94	7.65	4.3
Kabupaten Kudus	19	2017	73.84	7.59	3.56
Kabupaten Kudus	19	2018	74.58	6.98	3.28

Kabupaten Kudus	19	2019	74.94	6.68	3.80
Kabupaten Kudus	19	2020	75.00	7.31	5.53
Kabupaten Kudus	19	2021	75.16	7.60	3.77
Kabupaten Kudus	19	2022	75.89	7.41	3.21
Kabupaten Kudus	19	2023	76.71	7.24	3.25
Kabupaten Jepara	20	2008	71.94	11.05	5.76
Kabupaten Jepara	20	2009	72.45	9.60	4.40
Kabupaten Jepara	20	2010	72.64	10.18	4.56
Kabupaten Jepara	20	2011	73.12	10.32	5.48
Kabupaten Jepara	20	2012	68.45	9.38	4.29
Kabupaten Jepara	20	2013	69.11	9.23	6.34
Kabupaten Jepara	20	2014	69.61	8.55	5.09
Kabupaten Jepara	20	2015	70.02	8.50	3.12
Kabupaten Jepara	20	2016	70.25	8.35	3.98
Kabupaten Jepara	20	2017	70.79	8.12	4.84
Kabupaten Jepara	20	2018	71.38	7.00	3.75
Kabupaten Jepara	20	2019	71.88	6.66	2.92
Kabupaten Jepara	20	2020	71.99	7.17	6.70
Kabupaten Jepara	20	2021	72.36	7.44	4.23
Kabupaten Jepara	20	2022	73.15	6.88	4.10
Kabupaten Jepara	20	2023	73.85	6.61	3.35
Kabupaten Demak	21	2008	71.56	21.24	6.64
Kabupaten Demak	21	2009	72.10	19.70	5.72
Kabupaten Demak	21	2010	72.58	18.76	5.69
Kabupaten Demak	21	2011	73.09	18.21	5.03
Kabupaten Demak	21	2012	67.55	16.73	8.40
Kabupaten Demak	21	2013	68.38	15.72	7.08
Kabupaten Demak	21	2014	68.95	14.60	5.17
Kabupaten Demak	21	2015	69.75	14.44	6.02
Kabupaten Demak	21	2016	70.10	14.10	5.24

Kabupaten Demak	21	2017	70.41	13.41	4.47
Kabupaten Demak	21	2018	71.26	12.54	7.03
Kabupaten Demak	21	2019	71.87	11.86	5.42
Kabupaten Demak	21	2020	72.22	12.54	7.31
Kabupaten Demak	21	2021	72.57	12.92	5.28
Kabupaten Demak	21	2022	73.36	12.09	6.11
Kabupaten Demak	21	2023	74.07	12.01	5.38
Kabupaten Semarang	22	2008	73.34	11.37	7.39
Kabupaten Semarang	22	2009	73.66	10.66	7.88
Kabupaten Semarang	22	2010	74.10	10.50	6.25
Kabupaten Semarang	22	2011	74.45	10.30	6.16
Kabupaten Semarang	22	2012	70.88	9.40	4.87
Kabupaten Semarang	22	2013	71.29	8.51	3.90
Kabupaten Semarang	22	2014	71.65	8.05	4.38
Kabupaten Semarang	22	2015	71.89	8.15	2.57
Kabupaten Semarang	22	2016	72.40	7.99	2.17
Kabupaten Semarang	22	2017	73.20	7.78	1.78
Kabupaten Semarang	22	2018	73.61	7.29	2.25
Kabupaten Semarang	22	2019	74.14	7.04	2.54
Kabupaten Semarang	22	2020	74.10	7.51	4.57
Kabupaten Semarang	22	2021	74.24	7.82	5.02
Kabupaten Semarang	22	2022	74.67	7.27	4.81
Kabupaten Semarang	22	2023	75.13	7.17	4.05
Kabupaten Temanggung	23	2008	73.43	16.39	4.90
Kabupaten Temanggung	23	2009	73.85	15.05	4.24
Kabupaten Temanggung	23	2010	74.11	13.46	3.60
Kabupaten Temanggung	23	2011	74.47	13.38	3.54

Kabupaten Temanggung	23	2012	64.91	12.32	3.39
Kabupaten Temanggung	23	2013	65.52	12.42	4.87
Kabupaten Temanggung	23	2014	65.97	11.55	3.19
Kabupaten Temanggung	23	2015	67.07	11.76	1.5
Kabupaten Temanggung	23	2016	67.60	11.60	2.23
Kabupaten Temanggung	23	2017	68.34	11.46	2.97
Kabupaten Temanggung	23	2018	68.83	9.87	3.23
Kabupaten Temanggung	23	2019	69.56	9.42	2.98
Kabupaten Temanggung	23	2020	69.57	9.96	3.85
Kabupaten Temanggung	23	2021	69.88	10.17	2.62
Kabupaten Temanggung	23	2022	70.77	9.33	2.54
Kabupaten Temanggung	23	2023	71.33	9.26	2.32
Kabupaten Kendal	24	2008	69.40	17.87	6.39
Kabupaten Kendal	24	2009	70.07	16.02	5.64
Kabupaten Kendal	24	2010	70.41	14.47	5.57
Kabupaten Kendal	24	2011	70.85	14.26	6.54
Kabupaten Kendal	24	2012	67.55	13.17	6.31
Kabupaten Kendal	24	2013	67.98	12.68	6.43
Kabupaten Kendal	24	2014	68.46	11.80	6.15

Kabupaten Kendal	24	2015	69.57	11.62	7.07
Kabupaten Kendal	24	2016	70.11	11.37	6
Kabupaten Kendal	24	2017	70.62	11.10	4.93
Kabupaten Kendal	24	2018	71.28	9.84	6.02
Kabupaten Kendal	24	2019	71.97	9.41	6.26
Kabupaten Kendal	24	2020	72.29	9.99	7.56
Kabupaten Kendal	24	2021	72.50	10.24	7.55
Kabupaten Kendal	24	2022	73.19	9.48	7.34
Kabupaten Kendal	24	2023	73.86	9.39	5.76
Kabupaten Batang	25	2008	69.23	18.08	8.77
Kabupaten Batang	25	2009	69.84	16.61	7.11
Kabupaten Batang	25	2010	70.41	14.67	6.48
Kabupaten Batang	25	2011	71.06	13.47	6.66
Kabupaten Batang	25	2012	63.09	12.40	5.88
Kabupaten Batang	25	2013	63.60	11.96	7.02
Kabupaten Batang	25	2014	64.07	11.13	7.42
Kabupaten Batang	25	2015	65.46	11.27	4.56
Kabupaten Batang	25	2016	66.38	11.04	5.19
Kabupaten Batang	25	2017	67.35	10.80	5.82
Kabupaten Batang	25	2018	67.86	8.69	4.20
Kabupaten Batang	25	2019	68.42	8.35	4.11
Kabupaten Batang	25	2020	68.65	9.13	6.92
Kabupaten Batang	25	2021	68.92	9.68	6.59
Kabupaten Batang	25	2022	69.45	8.98	6.64
Kabupaten Batang	25	2023	70.20	8.92	6.06
Kabupaten Pekalongan	26	2008	70.31	19.52	7.38
Kabupaten Pekalongan	26	2009	70.83	17.93	4.18
Kabupaten Pekalongan	26	2010	71.40	16.29	4.04
Kabupaten Pekalongan	26	2011	71.86	15.00	6.91
Kabupaten Pekalongan	26	2012	65.33	13.85	5.08

Kabupaten Pekalongan	26	2013	66.26	13.51	4.78
Kabupaten Pekalongan	26	2014	66.98	12.57	6.03
Kabupaten Pekalongan	26	2015	67.40	12.84	5.1
Kabupaten Pekalongan	26	2016	67.71	12.90	4.74
Kabupaten Pekalongan	26	2017	68.40	12.61	4.39
Kabupaten Pekalongan	26	2018	68.97	10.06	4.36
Kabupaten Pekalongan	26	2019	69.71	9.71	4.35
Kabupaten Pekalongan	26	2020	69.63	10.19	6.97
Kabupaten Pekalongan	26	2021	70.11	10.57	4.28
Kabupaten Pekalongan	26	2022	70.81	9.67	3.23
Kabupaten Pekalongan	26	2023	71.40	9.67	3.25
Kabupaten Pemalang	27	2008	68.38	23.92	9.97
Kabupaten Pemalang	27	2009	69.02	22.17	12.26
Kabupaten Pemalang	27	2010	69.89	19.96	11.45
Kabupaten Pemalang	27	2011	70.22	20.68	7.37
Kabupaten Pemalang	27	2012	60.78	19.27	4.85
Kabupaten Pemalang	27	2013	61.81	19.27	6.48
Kabupaten Pemalang	27	2014	62.35	18.44	7.44
Kabupaten Pemalang	27	2015	63.70	18.30	6.53
Kabupaten Pemalang	27	2016	64.17	17.58	6.06
Kabupaten Pemalang	27	2017	65.04	17.37	5.59
Kabupaten Pemalang	27	2018	65.67	16.04	6.17
Kabupaten Pemalang	27	2019	66.32	15.41	6.45
Kabupaten Pemalang	27	2020	66.32	16.02	7.64
Kabupaten Pemalang	27	2021	66.56	16.56	6.71
Kabupaten Pemalang	27	2022	67.19	15.06	6.63
Kabupaten Pemalang	27	2023	68.03	15.03	6.55
Kabupaten Tegal	28	2008	69.54	15.78	9.56
Kabupaten Tegal	28	2009	70.08	13.98	9.24
Kabupaten Tegal	28	2010	70.59	13.11	7.48

Kabupaten Tegal	28	2011	71.09	11.54	10.59
Kabupaten Tegal	28	2012	62.67	10.75	6.12
Kabupaten Tegal	28	2013	63.50	10.58	6.89
Kabupaten Tegal	28	2014	64.10	9.87	8.47
Kabupaten Tegal	28	2015	65.04	10.09	9.52
Kabupaten Tegal	28	2016	65.84	10.10	8.42
Kabupaten Tegal	28	2017	66.44	9.90	7.33
Kabupaten Tegal	28	2018	67.33	7.94	8.24
Kabupaten Tegal	28	2019	68.24	7.64	8.12
Kabupaten Tegal	28	2020	68.39	8.14	9.82
Kabupaten Tegal	28	2021	68.79	8.60	9.97
Kabupaten Tegal	28	2022	69.53	7.90	9.64
Kabupaten Tegal	28	2023	70.23	7.30	8.60
Kabupaten Brebes	29	2008	67.08	25.98	7.92
Kabupaten Brebes	29	2009	67.69	24.39	9.42
Kabupaten Brebes	29	2010	68.20	23.01	8.21
Kabupaten Brebes	29	2011	68.61	22.72	11.08
Kabupaten Brebes	29	2012	60.92	21.12	8.22
Kabupaten Brebes	29	2013	61.87	20.82	9.61
Kabupaten Brebes	29	2014	62.55	20.00	9.53
Kabupaten Brebes	29	2015	63.18	19.79	6.49
Kabupaten Brebes	29	2016	63.98	19.47	7.26
Kabupaten Brebes	29	2017	64.86	19.14	8.04
Kabupaten Brebes	29	2018	65.68	17.17	7.20
Kabupaten Brebes	29	2019	66.12	16.22	7.39
Kabupaten Brebes	29	2020	66.11	17.03	9.83
Kabupaten Brebes	29	2021	66.32	17.43	9.78
Kabupaten Brebes	29	2022	67.03	16.05	9.48
Kabupaten Brebes	29	2023	67.95	15.78	8.98
Kota Magelang	30	2008	76.09	11.16	12.28

Kota Magelang	30	2009	76.37	10.11	14.95
Kota Magelang	30	2010	76.60	10.51	13.28
Kota Magelang	30	2011	76.83	11.06	11.51
Kota Magelang	30	2012	75.00	10.31	8.99
Kota Magelang	30	2013	75.29	9.80	6.75
Kota Magelang	30	2014	75.79	9.14	7.38
Kota Magelang	30	2015	76.39	9.05	6.43
Kota Magelang	30	2016	77.16	8.79	6.55
Kota Magelang	30	2017	77.84	8.75	6.68
Kota Magelang	30	2018	78.31	7.87	4.78
Kota Magelang	30	2019	78.80	7.46	4.37
Kota Magelang	30	2020	78.99	7.58	8.59
Kota Magelang	30	2021	79.43	7.75	8.73
Kota Magelang	30	2022	80.39	7.10	6.71
Kota Magelang	30	2023	81.17	6.11	5.25
Kota Surakarta	31	2008	77.16	16.13	9.57
Kota Surakarta	31	2009	77.49	14.99	10.44
Kota Surakarta	31	2010	77.86	13.96	8.73
Kota Surakarta	31	2011	78.18	12.90	7.70
Kota Surakarta	31	2012	78.44	12.00	6.29
Kota Surakarta	31	2013	78.89	11.74	7.22
Kota Surakarta	31	2014	79.34	10.95	6.16
Kota Surakarta	31	2015	80.14	10.89	4.53
Kota Surakarta	31	2016	80.76	10.88	4.5
Kota Surakarta	31	2017	80.85	10.65	4.47
Kota Surakarta	31	2018	81.46	9.08	4.35
Kota Surakarta	31	2019	81.86	8.70	4.16
Kota Surakarta	31	2020	82.21	9.03	7.92
Kota Surakarta	31	2021	82.62	9.40	7.85
Kota Surakarta	31	2022	83.08	8.84	5.83

Kota Surakarta	31	2023	83.54	8.44	4.58
Kota Salatiga	32	2008	75.81	8.47	11.27
Kota Salatiga	32	2009	76.11	7.82	10.95
Kota Salatiga	32	2010	76.53	8.28	10.22
Kota Salatiga	32	2011	76.83	7.80	9.02
Kota Salatiga	32	2012	79.10	7.11	6.84
Kota Salatiga	32	2013	79.37	6.40	6.21
Kota Salatiga	32	2014	79.98	5.93	4.46
Kota Salatiga	32	2015	80.96	5.80	6.43
Kota Salatiga	32	2016	81.14	5.24	5.19
Kota Salatiga	32	2017	81.68	5.07	3.96
Kota Salatiga	32	2018	82.41	4.84	4.23
Kota Salatiga	32	2019	83.12	4.76	4.33
Kota Salatiga	32	2020	83.14	4.94	7.44
Kota Salatiga	32	2021	83.60	5.14	7.26
Kota Salatiga	32	2022	84.35	4.73	5.58
Kota Salatiga	32	2023	84.99	4.66	4.57
Kota Semarang	33	2008	76.54	6.00	11.51
Kota Semarang	33	2009	76.90	4.84	10.66
Kota Semarang	33	2010	77.11	5.12	8.98
Kota Semarang	33	2011	77.42	5.68	7.65
Kota Semarang	33	2012	78.04	5.13	6.01
Kota Semarang	33	2013	78.68	5.25	6.02
Kota Semarang	33	2014	79.24	5.04	7.76
Kota Semarang	33	2015	80.23	4.97	5.77
Kota Semarang	33	2016	81.19	4.85	6.19
Kota Semarang	33	2017	82.01	4.62	6.61
Kota Semarang	33	2018	82.72	4.14	5.21
Kota Semarang	33	2019	83.19	3.98	4.50
Kota Semarang	33	2020	83.05	4.34	9.57

Kota Semarang	33	2021	83.55	4.56	9.54
Kota Semarang	33	2022	84.08	4.25	7.60
Kota Semarang	33	2023	84.43	4.23	5.99
Kota Pekalongan	34	2008	73.49	10.29	9.75
Kota Pekalongan	34	2009	74.01	8.56	8.61
Kota Pekalongan	34	2010	74.47	9.36	7.00
Kota Pekalongan	34	2011	74.90	10.04	8.06
Kota Pekalongan	34	2012	69.95	9.47	7.67
Kota Pekalongan	34	2013	70.82	8.26	5.28
Kota Pekalongan	34	2014	71.53	8.02	5.42
Kota Pekalongan	34	2015	72.69	8.09	4.1
Kota Pekalongan	34	2016	73.32	7.92	4.57
Kota Pekalongan	34	2017	73.77	7.47	5.05
Kota Pekalongan	34	2018	74.24	6.75	6.08
Kota Pekalongan	34	2019	74.77	6.60	5.80
Kota Pekalongan	34	2020	74.98	7.17	7.02
Kota Pekalongan	34	2021	75.40	7.59	6.89
Kota Pekalongan	34	2022	75.90	7.00	4.98
Kota Pekalongan	34	2023	76.71	6.81	5.02
Kota Tegal	35	2008	73.20	11.28	13.32
Kota Tegal	35	2009	73.63	9.88	15.74
Kota Tegal	35	2010	73.89	10.62	14.22
Kota Tegal	35	2011	74.20	10.81	9.77
Kota Tegal	35	2012	70.68	10.04	8.75
Kota Tegal	35	2013	71.44	8.84	9.32
Kota Tegal	35	2014	72.20	8.54	9.20
Kota Tegal	35	2015	72.96	8.26	8.06
Kota Tegal	35	2016	73.55	8.20	8.12
Kota Tegal	35	2017	73.95	8.11	8.19
Kota Tegal	35	2018	74.44	7.81	7.81

Kota Tegal	35	2019	74.93	7.47	8.08
Kota Tegal	35	2020	75.07	7.80	8.40
Kota Tegal	35	2021	75.52	8.12	8.25
Kota Tegal	35	2022	76.15	7.91	6.68
Kota Tegal	35	2023	77.02	7.68	6.05